

Dr. Saifuddin Yunus, Dr. Suadi dan Fadli, M. Si

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU

Editor : Yusra Jamali

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU

Dr. Saifuddin Yunus

Dr. Suadi

Fadli, M. Si



Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. @ 2017, Dr. Saifuddin Yunus, (dkk),

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau isi seluruhnya buku ini tanpa ada izin
dari penulis atau penerbit

Penulis

Dr. Saifuddin Yunus

Dr. Suadi

Fadli, M. Si

Editor: Dr. Yusra Jamali, M. Pd

Desain Layout : Yusma Utama

Penerbit dan Percetakan
Bandar Publishing

Head Office.

Lamgugob, Syiah Kuala.

Banda Aceh. Provinsi Aceh.

E-mail: bandar.publishing@gmail.com

Cetakan I, September 2017

ii + 130 hal.

15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-602-5440-02-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad S. A.W beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Buku ini merupakan pengembangan dari buku sebelumnya yang pernah terbit tahun 2015 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Pasca konflik Aceh melalui pendekatan komoditi kelapa sawit”. Dengan terbitnya buku ini mudah-mudahan dapat memperkaya referensi dalam bidang ilmu sosial.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang telah mendanai penelitian kami hingga terbitnya buku ini. Terima Kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Malikussaleh yang sangat banyak membantu dari segi administrasi, serta kepada semua pihak yang telah memberikan ide atau gagasan serta telaah kritis dari awal penyusunan buku ini hingga akhirnya dapat diterbitkan.

Akhirnya saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan buku ini pada edisi berikutnya. Hanya kepada yang maha mengetahui kita mengharap hidayah dan petunjuk-Nya. Amin.

Lhokseumawe, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1
1.1 Konsep Pemberdayaan	1
1.2 Pemberdayaan Sebagai Proses Pemba-ngunan Masyarakat	5
1.3 Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan	9
1.3.1 Konsep Kebijakan	9
1.3.2 Kemiskinan dan Strategi Pengen-tasannya	10
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMODITI SAWIT	13
2.1 Kelapa Sawit	13
2.2 Potensi Sawit dan Pemberdayaan Ekonomi	15
2.3 Peta Pemanfaatn Kebun Kelapa Sawit Mantan Kombatan GAM dan Masyarakat Korban Konflik	18
2.4 Pemberdayaan Ekonomi Mantan GAM dan Korban Konflik	26
BAB III DAMPAK PENANAMAN KELAPA SAWIT	37
3.1 Dampak Sosial dan ekonomi	37
3.2 Dampak Lingkungan	45
BAB IV KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN	51
4.1 Dasar Kebijakan Pemerintah untuk Pember-dayaan Masyarakat	51
4.2 Perencanaan Program Bantuan Sawit	54
4.3 Pelaksanaan Program Bantuan Sawit	56
4.4 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sawit	58

4.5	Model Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan	58
4.6	Model Pemberdayaan Bidang Pertanian	66
BAB V	DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN MODEL PEMBERDAYAAN TERPADU	77
5.1	Proses Pembentukan Model Integrasi Sawit dan Sapi dalam Pemberdayaan Ekonomi.	77
5.2	Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Integrasi Sawit dan Sapi Dalam Pemberdayaan Ekonomi.	94
5.3	Dampak Integrasi Sawit dan Sapi Terhadap Pendapatan Masyarakat.	100
5.4	Dampak Sosial dari Model Integrasi Sawit dan Sapi	105
BAB VI	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU	109
6.1	Sinergisitas antar satuan kerja pemerintah dan pihak swasta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	109
6.2	Model Integrasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	112
6.3	Analisis dan Pengembangan Model Integrasi	120
	DAFTAR PUSTAKA	127
	BIODATA PENULIS	131

BAB I

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “*Power*”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan

kemudian lebih dekat dengan gelombang neoMarxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik Frankfurt School.

Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang muncul pada paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur dan anti-determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan (Widayanti, 2012). Sementara terminologi pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) mulai dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Pada mulanya lebih dikenal dengan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga non pemerintah (NGO), namun kini telah menjadi satu konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Hampir semua departemen/lembaga pemerintah non departemen memiliki program pemberdayaan masyarakat atau konsen dengan 'isu' memberdayakan masyarakat yang dicantumkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Hal seperti ini juga berlaku di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian, dengan tafsir yang berbeda terhadap konsep pemberdayaan, pelaksanaan program pemberdayaan telah

melum-puhkan masyarakat menjadi lebih tak berdaya untuk mandiri, artinya program pemberdayaan lebih menambah tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan pihak lain (Muflich, 2006).

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto, 2008).

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho, 2001).

Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan adalah upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penguatan ekonomi dipandang sebagai langkah awal atau dasar, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara.

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (3) Fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi. (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan

dari atas dalam merumuskan program, pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

1.2 Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat

Terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu proses dimana usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional (Subejo dan Iwamoto Noriaki, 2003)

Dalam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power* meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya. Meskipun belum ada kesepakatan dan pengertian yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan *community empowerment*, nampaknya cukup penting dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat

yang dirilis oleh Tim Deliveri (2004) sebagai salah satu acuan, yaitu:

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.

Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development* disajikan dalam Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigm baru pendekatan pembangunan.

Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*".

Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan keter-gantungan, berbagai pihak terkait terlibat

(instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelajutan.

Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Sesuai dengan visi *Community Empowerment for Rural Development* (CERD) yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan.

Sekarang saatnya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru tersebut dengan tetap diiringi dan dipantau oleh tim monitoring dari pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat sesuai yang dicanangkan sejak awal. Proses pemberdayaan masyarakat yang efisien akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan keberlanjutan karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

1.3 Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

1.3.1 Konsep dan Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yaitu rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto, 2011). Sementara Winarno (2007) mengatakan kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Berdasarkan beberapa definisi di atas kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian ide atau gagasan yang tersusun yang dijadikan sebagai pedoman acuan strategi dan kerangka tindakan yang ditetapkan sebagai *roadmap* pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Untuk itu, kebijakan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tetapi memerlukan usaha para pengambil kebijakan untuk mengimplimen-tasikannya. George C Edwar III

mengusulkan bahwa kebijakan dapat dijalankan melalui empat unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Indiahono, 2009)

1. Komunikasi, setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasi yang dijalankan efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran.
2. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
3. Disposisi, implementator kebijakan harus memiliki karakter jujur, komitmen dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, kerangka kerja dan struktur organisasi pelaksana mudah dipahami, tidak berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi juga harus menjamin adanya pengambilan keputusan secara cepat atas kejadian di luar kebiasaan.

1.3.2 Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya

Secara etimologi kemiskinan dapat berarti tidak memiliki harta, berpenghasilan rendah dan serba kekurangan dalam memenuhi keperluan hidup. Oscar Lewis dalam Antjok (1995) menyatakan kemiskinan adalah penderitaan ekonomi dalam enam bentuk, yaitu; (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) pengangguran dan pengangguran tenaga skil (3) upah buruh rendah (4) tidak berhasilnya golongan

berpenghasilan rendah dalam meningkatkan status sosial (5) sistem keluarga bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Selo Sumarjan (1977) adalah disebabkan oleh tiga faktor. Pertama faktor individual, yaitu seorang miskin karena tidak memiliki modal financial, modal ketrampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk maju serta tidak mendapat kesempatan pendidikan. Kedua, faktor struktural yaitu miskin yang tercipta dari sistem pengelolaan sumber daya yang tidak tepat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses kepada sumber daya secara baik. Ketiga, faktor budaya yaitu masyarakat tidak memiliki dorongan sosial untuk menggali sumber daya yang melimpah. Adat dan budaya menjadi penghambat untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik.

Ada tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan menurut Starhm (1999) yaitu; pertumbuhan melalui integrasi ke dalam perekonomian pasar bebas (2) tatanan perekonomian baru dan (3) pembangunan mandiri dengan melihat kekurangan rantai-rantai kemiskinan.

Sedangkan Antjok (1995) merumuskan empat strategi pengentasan kemiskinan, yaitu; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga produk pertanian yang memadai serta peluang kerja, (2) investasi

pelayanan dalam bidang infrastruktur fisik dan sosial, (3) penyediaan teknologi bagi si miskin, (4) peran kelembagaan yang efektif, seperti NGO dan konsultan yang memberi pelayanan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas hidup.

Sementara Dalle Daniel Sulekale (2008) menyatakan upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Para pembuat kebijakan tidak melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partaisipasi penduduk miskin.

Disamping itu dibutuhkan pendampingan yang membantu mendorong tumbuhnya partaisipasi penduduk miskin dalam proses pembangunan di lingkungannya, dan penguatan kemampuan kelembagaan penduduk miskin dengan pelatihan dalam satuan kelompok-kelompok penduduk miskin bentukan mereka.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMODITI KELAPA SAWIT

2.1 Kelapa Sawit

Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika, kemudian banyak berkembang di Amerika dan Asia Tenggara (Adams, 2011). Secara usia kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman tahunan. Ia merupakan komoditas andalan untuk ekspor non migas. Indonesia merupakan negara pengekspor kelapa sawit terbesar, kemudian disusul oleh Malaysia dan Papua New Guinea (Portal Nasional Republik Indonesia, 2010).

Pemanfaatan kelapa sawit lebih populer digunakan sebagai minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah dan

perasan biji. Kelapa sawit memiliki nilai konsumtif dan nilai ekonomis. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan di dunia, produksinya menempati tingkat pertama minyak nabati yang mencapai sekitar 45 juta ton (Adams, 2011), dan menempati urutan kedua dari minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah minyak kedelai.

Saat ini Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah terbesar kedua di dunia, dengan menguasai 42,8% produksi CPO dunia yang berjumlah 36,87 ton. Provinsi Aceh, yang terletak di bagian barat Indonesia, memiliki iklim dan topografi yang sangat “ideal” bagi penggarapan kelapa sawit. Dikarenakan perjuangan kemerdekaan yang berlangsung selama 30 tahun di daerah ini antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, hal tersebut menjadikan suatu situasi yang tidak menentu dan kondisi keamanan yang berbahaya, potensi ini belum sepenuhnya tereksploitasi hingga saat ini.

Kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami pada bulan Desember 2004 yang kemudian disusul oleh proses perdamaian antara dua pihak yang bertikai, provinsi Aceh mengalami banjir bantuan yang berjumlah US\$6,1 juta. Bantuan tersebut adalah untuk membantu perbaikan sektor pertanian, termasuk produksi kelapa sawit (Firman dkk, 2007).

Bertahun-tahun, pemerintah di Aceh memiliki rencana untuk perluasan dan mendorong investasi di sektor kelapa sawit; sekarang ini dengan adanya bantuan yang berlimpah tersebut serta

ketersediaan sumber daya lainnya tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana-rencana yang pernah ada.

Potensi kontribusi kelapa sawit yang mungkin diperoleh untuk perekonomian lokal bukanlah hal yang perlu diragukan. Tetapi, kelapa sawit memiliki dampak terhadap sosial, lingkungan dan ekonomi yang berjalan beriringan dengan perluasan perkebunan yang cepat.

2.2 Potensi Sawit dan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat *People – centred, partaicipatory, empowering, and sustainable*. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu (Chambers, 1995).

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan, menswadayakan, memandirikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian pihak luar seperti

pemerintah, melainkan sebagai posisi sebagai obyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdaya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan serta ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator penurunan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/ layak. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Sedangkan keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya.

Selain itu pemerintah mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk memberikan layanan publik dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan jika berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Sawit mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat apalagi mendapat dukungan dari pemerintah. Dalam kasus Aceh misalnya setelah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah Aceh membuat salah satu program pemberdayaan masyarakat korban konflik dan mantan pejuang GAM dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah mendukung secara *financial* (keuangan) mulai dari pembersihan lahan, penanaman, peralatan hingga ke pemupukan. Masyarakat tentu menyambut baik program semacam ini, karena yang diuntungkan juga masyarakat. Apabila umur sawit telah mencapai masa panen (\pm 4 tahun) masyarakat bisa

memanennya dalam sebulan dua kali atau lima belas (15) hari sekali, tentu hal ini sangat membantu ekonomi masyarakat.

Mengingat besarnya potensi sawit untuk pemberdayaan ekonomi Pemerintah Aceh telah menerapkan program pemberdayaan masyarakat melalui komoditi kelapa sawit ini di berbagai kabupaten di Aceh, antara lain di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie (Sigli), Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tamiang. Selain mudah dari segi perawatan, kelapa sawit juga bisa diintegrasikan dengan tanaman muda lainnya pada saat umur sawit 0-3 tahun. Jika umur sawit telah mencapai lima tahun juga bisa dilepaskan hewan ternak seperti kambing dan lembu sehingga dapat dikatakan potensi sawit untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat besar.

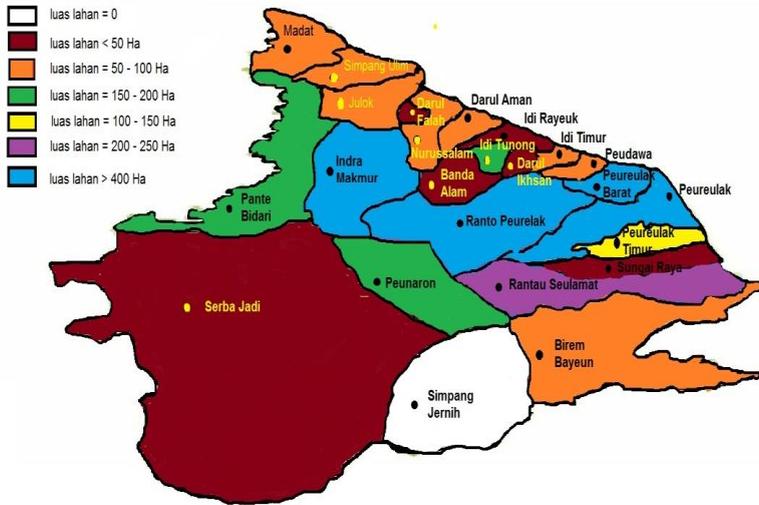
2.3 Peta Pemanfaatan Kebun Kelapa Sawit Mantan Kombatan GAM dan Masyarakat Korban Konflik

Asnawi, dkk (2013) menyebutkan bahwa Aceh Timur memiliki lahan perkebunan sawit produktif seluas 16.573 Ha¹ dengan produksi 136.651 ton (perkebunan besar) dan Perkebunan rakyat dapat menghasilkan 30.491 ton pertahunnya. Luas areal sawit rakyat Aceh Timur tahun 2013 yaitu 19.853,50 Ha yang tersebar di 24 Kecamatan (BPS Aceh Timur, 2014).

¹ Jumlah ini berbeda dengan yang didapatkan oleh tim peneliti ini melalui studi dokumen Dinas Perkebunan 2014, di mana luasnya mencapai 19.798 Ha.

Luas areal kelapa sawit bantuan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh Timur sekitar 3.726 Ha, yang tersebar pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang (Dokumen Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014). Hanya satu kecamatan saja yang tidak mendapat bantuan untuk pengembangan kelapa sawit yaitu kecamatan Simpang Jernih. Sebanyak empat kecamatan yaitu Indra Makmur, Rantau Peureulak, Peureulak dan Peureulak Barat mendapat bantuan lebih dari 400 Ha. Yang paling kecil perolehan bantuan kelapa sawit dari Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Serbajadi, Darul Falah, Banda Alam, Idi Rayeuk dan Darul Ihsan yaitu kurang dari 50 Ha.

Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Aceh Timur, jumlah bantuan kelapa sawit yang diberikan untuk mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik adalah mencapai 18,8 %. Besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap orang adalah rata-rata seluas 1,1 Ha.



Gambar 2.1: Peta Areal Sawit Bantuan untuk Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik setiap Kecamatan di Aceh Timur

Nasruddin Abubakar, mantan Wakil Bupati Aceh Timur Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik, melalui bantuan Kementerian BUMN. Luas areal yang direncanakan sebesar 15.000 Ha atau senilai 2 milyar (Wawancara, 17 Mei 2014). Namun program tersebut tidak dapat direalisasikan, karena ketidaksiapan Pemerintah Aceh Timur dalam memenuhi persyaratan administrasi ketika itu (Aceh Timur belum memiliki data yang akurat tentang kelompok penerima manfaat, sementara lahannya sudah ada).

Sebenarnya pada awalnya Koperasi Bina Nanggroe sudah menyediakan data lahan dan kelompok yang dibutuhkan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan relatif valid, namun oleh

Muslem Hasbullah (Bupati Aceh Timur ketika itu) menolak Koperasi Bina Nanggroe dan mengusulkan koperasi yang lain. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Sehingga sampai akhir jabatan pemerintahan Muslem dan Nasruddin, program bantuan yang direncanakan tersebut tidak jelas realisasinya. Padahal jika program pemberdayaan tersebut berjalan, maka sangat positif dampaknya bagi proses pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur ke depan. Namun demikian, menurut Nasruddin pemberdayaan melalui pemberian lahan dan bantuan penanaman sawit sangat bagus, akan tetapi program tersebut juga berdampak pada kemunduran tingkat kreativitas penerima untuk mengembangkan diri mereka karena terbiasa dengan hanya menerima bantuan yang dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan.

Perilaku masyarakat yang demikian itu, bantuan yang diberikan hanya berdampak positif dalam jangka pendek. Di mana masyarakat penerima bantuan akan cenderung menjual apa yang mereka dapatkan. Seharusnya kebijakan pemberian bantuan untuk pemberdayaan harus dilakukan dengan pemberian kapasitas penerima melalui pemberian pendidikan dan pelatihan serta membangun kapasitas masyarakat supaya mereka menganggap bahwa program bantuan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara menurut Ibrahim, Kepala Tata Usaha, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Timur mempunyai lahan sekitar 115 Hektare yang dimanfaatkan untuk penanaman sawit oleh masyarakat. Lahan tersebut dikelola

dengan sumber dana reguler untuk pembukaan lahan dan penanaman sawit. Akan tetapi terdapat satu kendala, yaitu masalah koordinasi antara Dinas Perkebunan Aceh Timur dengan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh dalam pelaksanaannya (wawancara, 17 Mei 2014).

Pemerintah Provinsi sudah mendesain programnya sedemikian rupa, tetapi tiba-tiba disuruh buat Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK) kepada Dinas Perkebunan Aceh Timur. Kami tidak mau buat, karena untuk apa kita buat rencana usulan, semua barang sudah ada, lokasinya sudah jelas. Biasanya pihak dinas (Provinsi) menyuruh dinas kabupaten untuk membuat usulan, tetapi formalitas saja dari kami. Akibatnya kami tidak mau, kami suruh sosialisasikan sendiri ke masyarakat. Makanya kenyataan ini agak rancu, kabupaten yang punya lahan, provinsi buat program sendiri tanpa memberitahukan program ke kabupaten.

Beliau melanjutkan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012, ada lahan di Julok dan Pante Bidari, luas areal 100 hektare, dan pengelolanya (diketua oleh si Baret). Masyarakat korban konflik dan mantan kombatan mengusulkan bantuan langsung ke dinas provinsi, namun mereka tidak menyebutkan secara terperinci identitas mereka apakah mereka korban konflik atau kombatan.

Akan tetapi kedua kriteria tersebut ada sama mereka (pengurus koperasi). Mereka bukan hanya mengusulkan bantuan

ke dinas, tetapi ada juga di antara mereka yang mengusulkan bantuan ke Dewan Provinsi (anggota DPRA) untuk mendapatkan dana ‘aspirasi’ dewan. Dalam perjalanannya, sebahagian mereka ada yang mendapatkan bantuan (dari aspirasi dewan), tetapi juga tidak diberitahukan ke dinas kabupaten, mereka mengurus sendiri langsung ke Banda Aceh, tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, padahal areal lahan yang diusulkan berada di dalam kawasan Aceh Timur. Oleh sebab itu, dapat kami katakan bahwa areal lahan sawit untuk kombatan di Aceh Timur sudah ada.

Selain itu, pada tahun 2010 Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh 2007-2012) juga memberikan bantuan pembukaan lahan dan penanaman sawit seluas 40 Hektare, yang berlokasi di Buket Makmur Julok Aceh Timur. Dikordinir oleh si Mamplam. Program ini didampingi oleh pak Basarudin² dari Dinas Perkebunan Aceh Timur. Berdasarkan kenyataan ini, menjelaskan bahwa di Aceh Timur telah diberikan bantuan untuk kelompok miskin, yang terdiri dari korban konflik dan mantan kombatan GAM.

Mereka umumnya ketika memohon bantuan mengatasnamakan Komite Peralihan Aceh (KPA) / Partai Aceh

². Pak Basarudin berstatus sebagai pegawai pada Unit Pengelola Program Pertanian (UPPP), Khusus sawit dari Dinas Perkebunan Aceh Timur.

(PA)³, sehingga pihak dinas harus berusaha membantu kelompok mereka. Bahkan sampai hari ini yang paling sering datang ke kantor untuk minta bantuan/proyek adalah orang KPA/PA, sementara masyarakat biasa jarang sekali datang ke kantor.

Namun demikian, jumlah areal lahan sawit yang disebutkan di atas tidak diperuntukkan secara khusus kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik, tidak terlihat secara jelas terpisahkan dari areal sawit masyarakat lainnya, karena semua masyarakat menganggap dirinya korban konflik. Seperti diutarakan oleh masyarakat dalam Fokus Group Diskusi berikut:

“Jangan ditanya berapa jumlah korban konflik yang menerima bantuan dan anggota koperasi. Semua masyarakat Aceh, khususnya kami di Aceh Timur adalah korban konflik, termasuk guru dan kebijakan. Ketika konflik berlansung di Aceh jika ada masyarakat yang tidak merasa dipukul oleh aparat keamanan dianggap bukan sebagai orang Aceh, bahkan merasa malu karena dianggap tidak melawan pemerintah Indonesia yang dinilai seperti penjajah ketika itu (FGD, 28 September 2014):

Supaya program penanaman sawit yang dilaksanakan berjalan lebih efektif, Pemerintah Aceh Timur telah membangun

³ Kedua organisasi ini merupakan organisasi sipil dan politik GAM setelah perjanjian perdamaian sebagai bentuk nyata transformasi GAM.

satu sistem yang dinilai baik. Salah satunya adalah melalui Program Peumakmu Gampong. Program ini direncanakan akan berlangsung mulai tahun 2014. Mekanisme pelaksanaannya adalah menyeleksi petani yang layak untuk dibantu. Namun sebelum bantuan diberikan, kelompok sasaran terlebih dahulu diberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian, selanjutnya dilakukan pendam-pingan secara berkelanjutan. Program ini akan dilaksanakan di Kecamatan Peunaron, Indra Makmu, Birem Bayeun, Ranto Perlak dan Ranto seulamat.

Walau bagaimanapun, pada saat ini terdapat lima permasalahan utama yang dialami oleh para petani sawit di Aceh Timur, yaitu: pertama, hama gajah dan hama wereng. Kedua, jalan menuju ke lokasi sawit sangat sukar untuk diakses. Ketiga, ketersediaan pupuk yang tidak memadai, kadang-kala pupuk ada tapi harganya mahal, kadang-kadang pesediaannya tidak ada.

Keempat, kualitas produksi buah sawit menurun akibat dari serangan hama dan kurang pupuk. Kelima, Harga jual sawit tidak terkontrol, kadang-kadang harganya merosot sangat murah mencapai Rp 500 (wawancara dengan mukhlis, petani sawit, 29 September 2014).

2.4 Pemberdayaan Ekonomi Mantan GAM dan Korban Konflik

Pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik telah dilakukan sejak tahun 2006 dalam berbagai bentuk bantuan, baik ekonomi maupun sosial. Namun untuk ekonomi produktif melalui pertanian khususnya sawit dimulai pada tahun 2009.

Jumlah kecamatan yang menerima bantuan penanaman kelapa sawit pada tahun 2009 yaitu 6 kecamatan dengan total luas 1100 Ha dan jumlah petani 590 orang. Kecamatan-kecamatan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2009 adalah; Idi Tunong, Indra Makmur, peureulak, Perlak Barat, Ranto Peureulak dan Ranto Seulamat. Menurut Ahmadi Mustafa, S. Pd.I (Ketua BP2A) Aceh Timur bahwa pemberdayaan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur dilakukan dalam berbagai macam cara antara lain (wawancara dengan Ahmadi Mustafa, 15 Juli 2014):

1. Pada tahun 2006-2011 bantuan rumah yang sudah jadi 4.100 unit rumah.
2. Pada tahun 2007 - 2009 ada bantuan diat yang diberikan oleh pemerintah kepada para kombatan GAM dan korban konflik sebesar Rp. 3.000.000.-
3. Pada tahun 2007 – 2009 juga ada bantuan untuk orang cacat akibat konflik sebesar Rp. 10.000.000.-

4. Pada tahun 2009 ada bantuan mukena dan sajadah kepada teungku dayah.
5. Pada tahun 2010 ada pelatihan perbengkelan untuk 20 orang peserta yang dipilih secara professional dan selesai pelatihan diberikan modal usaha sebesar Rp. 25.000.000.-
6. Pada tahun 2011-2013 ada bantuan becak sebanyak 13 buah.
7. Pada tahun 2012 bantuan Tugu Perdamaian didirikan di Jalan Medan Banda Aceh Kecamatan Darul Aman Idi Cut.
8. Pada tahun 2013-2014 ada bantuan Jaminan sosial sebesar Rp. 3.000.000.- setahun dan telah melayani sebanyak 200 orang.

Namun jika dilihat dari jumlah mantan kombatan GAM dengan realisasi bantuan rasionya masih sangat kecil. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit, masyarakat penerima bantuan di sektor perkebunan sawit saat ini mulai tersenyum menyongsong masa panen.

Penduduk Aceh Timur yang menerima bantuan sawit sangat serius dalam mengelola sawit bantuan APBA 2008, saat ini sedang bersiap menyongsong masa petik tandan sawit untuk dirupiahkan (Tabloid Tabangun Aceh, 2011). Menurut informan yang diwawancarai bahwa program bantuan sawit sangat membantu peningkatan perekonomian mereka dalam memenuhi

keperluan sehari-hari, baik kepada petani maupun pemuda dan masyarakat sekitarnya. Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas dan tidak melebihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi (ayek) bahwa:

“Dengan adanya program bantuan sawit dari Pemerintah Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi perekonomian mantan kombatan dan korban konflik sangat terbantuan. Kondisi sawit kami sudah masuk tahap produksi dengan jumlah 2.5 ton perhektar per 15 hari. Penghasilan dari kelapa sawit perbulan rata-rata perhektar mencapai Rp. 1.000.000.-. Dan para pemuda dan masyarakat sekitar juga memperoleh pendapatan perhari dari bekerja sebagai pendodos dan pengangkut sawit sebesar Rp. 200.000,- per hari perorang”.

Tabel 2.1: Jenis dan jumlah bantuan diberikan kepada GAM

NO	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	KET
1	DATA USULAN KE BP2A PUSAT			
	Data Mantan Kombatan GAM (TNA)	5,148	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Tapol/ Napol	367	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Janda Dan Anggota Waris GAM (TNA)	1,335	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Jaminan		Orang	Masih

	Sosial Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	1,570		Tahap Usulan
	Data Diyat	4,344	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Rumah Dibakar/ Dirusak Akibat Konflik	4,854	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Cacat Berat/ Ringan Akibat Konflik	8,718	Orang	Masih Tahap Usulan
2	REALISASI BANTUAN DALAM TAHUN 2013			
	Bantuan Rumah Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	25	Unit	75,000,000
	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	200	Orang	3,000,000
	Bantuan Anak Yatim Korban Konflik	10	Orang	200,000
	Bantuan Sepeda Motor Modifikasi Merk Honda Bagi Penyandang Cacat Akibat Konflik	6	Unit	-

Sumber: Dokumen BP2A Aceh Timur, 2014

Selain itu, dampak positif terhadap keamanan juga meningkat, dimana tingkat kriminalitas menurun, kalau kita parkir motor di depan rumah tidak hilang lagi. Demikian juga buah sawit sudah tidak hilang karena semua pemuda sudah punya kerja sendiri. Hal ini mungkin juga disebabkan masyarakat di sekitar kampung tersebut dapat menambang minyak dengan menggali sumur bor secara manual/tradisional. Sehingga semua pemuda ada kegiatan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Keberhasilan bidang sawit meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan bidang lain para pengelola sawit. Rata-rata petani pengelola kebun sawit sudah memiliki kendaraan sendiri (motor) bahkan di antara mereka ada yang sudah memiliki kendaraan roda empat (mobil). Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi rumah masyarakat di Desa tersebut. Kondisi rumah yang ada sekarang sudah layak huni dilihat dari segi luas dan konstruksi bangunan.

Senada dengan kenyataan di atas, informen pada lokasi lainnya juga mengatakan hal yang serupa bahwa melalui bantuan tanaman sawit tingkat pendapatan masyarakat meningkat, dimana biaya pendidikan anak-anak sudah terpenuhi. Dengan adanya panen sawit ini kebutuhan rumah tangga dan jajan anak-anak sudah tidak repot lagi. Jika pun belum datang masa panen, mereka mudah mendapat pinjaman dari toke, karena sumber

bayarnya sudah jelas. Salah seorang informan berinisial M.A dalam Fokus Group Diskusi menyatakan bahwa:

“Sekarang jika anak kami mau jajan petik aja satu tandan sawit jika dijual ada uang 50 ribu sudah cukup untuk dia. Kalau perlu uang untuk beli ikan tinggal petik satu tandan sudah mencukupi untuk membeli satu kilogram ikan basah (FGD, di Seuenubok Buya, 28 September 2014)”.

Tingkat pendapatan mantan kombatan GAM dan korban konflik dari usaha perkebunan sawit program bantuan pemerintah rata-rata sebesar Rp. 1.755. 547,- perbulan. Tingkat pendapatan tersebut diperoleh dari produksi kelapa sawit yang baru berumur 4-5 tahun. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2: Rata-rata Pendapatan Petani dari Bantuan Sawit per Bulan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014.

No	Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan per petani (Ha/Orang)	Hasil Sawit (Kg/Ha) ^(*)	Hasil Sawit per Petani (Kg/Orang)	Harga (Rp/Kg)	Pendapatan (Rp/Orang)
1	Idi Tunong	93	154	1.7	800.00	1,324.73	1,000.00	1,324,731.18
2	Indra Makmu	250	500	2.0	900.00	1,800.00	1,000.00	1,800,000.00
3	Peureulak	100	200	2.0	800.00	1,600.00	1,000.00	1,600,000.00
4	peureulak barat	63	96	1.5	1,000.00	1,523.81	1,000.00	1,523,809.52
5	Ranto Peureulak	59	100	1.7	1,230.00	2,084.75	1,000.00	2,084,745.76
6	Ranto Seulamat	25	50	2.0	1,100.00	2,200.00	1,000.00	2,200,000.00
Total				10.9	5,830.00	10,533.29		10,533,286.47
Rata-rata				1.8	971.67	1,755.55		1,755,547.74
Keterangan (*) Panen pada saat umur sawit 4 - 5 tahun								

Sumber: Diolah dari laporan tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014.

Selain itu lahan sawit juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan ekonomi tambahan melalui penanaman tanaman muda dan pemeliharaan binatang ternak. Yang pertama dilakukan sebelum sawit berbuah untuk penanaman tanaman muda yang dapat membantu perekonomian sehari-hari mereka. Apabila sawitnya sudah mencapai umur 3 tahun maka masyarakat petani juga memanfaatkan areal tersebut untuk memelihara ternak seperti sapi dan kambing. Dari peternakan diperkirakan dapat memperoleh keuntungan dalam masa 6 bulan pemeliharaan.

Satu sapi dapat diperoleh keuntungan mencapai 5 juta jika dirawat dengan makanan yang cukup. Namun tidak semua petani memiliki peliharaan ternak sendiri, sebagian mereka memelihara ternak orang yang keuntungannya harus dibagi dua (FGD, 27 September 2014). Namun demikian kenyataan di atas belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM, karena di antara mereka yang memperoleh bantuan juga ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman sawit. Mereka memanfaatkan bantuan untuk keperluan konsumtif jangka pendek. Bibit dan bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dijual, dan uangnya dipakai untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

Bahkan lahan pertanian yang sudah disiapkan untuk tanaman sawit juga dijual. Seperti yang terjadi dikawasan Alue Bu Tuha, Aceh Timur. Dimana seorang petani telah membeli lahan dan bantuan sawit dari petani lainnya yang berjumlah 2.5

Ha (Wawancara dengan Asnawi, 26 September 2014). Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Sekarang yang kita khawatirkan adalah bantuan yang sedemikian banyak dari pemerintah tidak digunakan secara baik oleh masyarakat. Sebagai contoh kita berikan bantuan bibit, bibitnya di jual, kemudian uangnya dipakai untuk konsumtif dan uang itu akan habis dalam waktu yang tidak lama. Ketika pemerintah memberikan biaya tanam bibit, uangnya diambil untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena bibit yang diberikan sebelumnya sudah di jual dan lahannya pun ikut dijual kepada orang kaya” (Wawancara, 17 Oktober 2014).

Selain itu juga bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban konflik dan mantan GAM dilakukan secara bertahap. Akibatnya sampai saat ini masih ada di antara mereka yang belum memperoleh bantuan. Baik bantuan pertanian (sawit) maupun bantuan lainnya. Jumlah masyarakat korban konflik dan mantan GAM belum sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan.

Sehingga keadaan ekonomi masyarakat juga belum stabil, sebagian dari mereka masih sering menjumpai kepala dinas untuk meminta uang, terutama pada hari-hari besar Islam (Hari Raya

Idul Fitri dan Idul Adha) dimana pada dua momentum ini juga dikenal hari *megang* yang memerlukan banyak uang untuk membeli daging hewan untuk dimakan. Dalam keadaan seperti ini sebagian mantan kombatan GAM sering meminta uang ke dinas-dinas. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur Saifuddin menyebutkan bahwa:

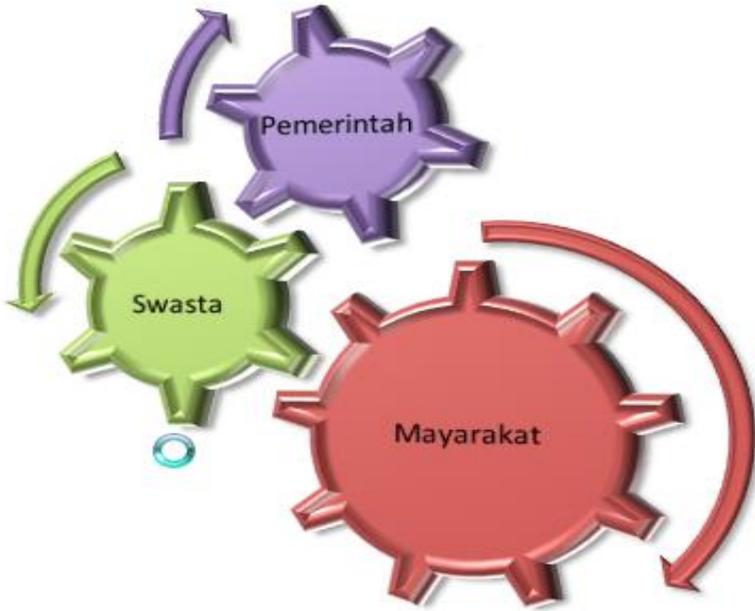
“Menjelang *megang* dan hari raya saya selalu harus putar otak untuk mengatasi masalah peminta-minta yang datang ke kantor untuk minta uang hari raya dan uang *megang* bahkan menjelang *megang* saya tidak bisa terus berada di kantor. Kalau saya tidak berada di kantor mereka menelpon, disinilah perlu seni untuk berkomunikasi dan menolak secara halus. Jika saya lihat fenomena yang terjadi selama ini, saya berpendapat masyarakat kita mengalami masalah kerusakan mental dan moral atau degradasi moral. Kita telah kehilangan panutan daripada pemimpin-pemimpin kita” (Wawancara, 17 Oktober 2014).

Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik pemerintah Aceh Timur telah merancang satu model pembangunan yang integratif. Model integrasi ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Diharapkan ketika masyarakat petani sudah mulai panen hasil pertaniannya, harga jual ke pasar tidak dipermainkan oleh pihak swasta (pedagang pengumpul,

pedagang kecil dan pedagang besar), yang menyebabkan harga turun drastis dan merugikan petani. Dalam keadaan seperti inilah pemerintah harus berperan aktif untuk mengontrol pihak swasta agar jangan sampai merugikan para petani.

Selain itu model integratif perlu dirancang oleh pemerintah Aceh Timur yaitu menggabungkan pertanian dan peternakan. Dimana lahan pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk peternakan seperti ternak lembu dan kambing. Hal ini dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama antar Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan untuk memastikan bantuan yang diberikan diterima oleh satu kelompok untuk memanfaatkan kedua bantuan tersebut (perkebunan dan peternakan). Maka para petani dapat memperoleh keuntungan ekonomi ganda dan dapat menopang ekonomi mereka sebelum masa panen hasil pertanian (wawancara dengan saifuddin, 17 Oktober 2014).

Model yang dimaksudkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1: *Wheel Integrative Development Model*

BAB III

DAMPAK PENANAMAN KELAPA SAWIT

3.1 Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial yang bersifat negatif berupa keamanan pangan, terjadinya perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan dapat berdampak pada lingkungan dan perubahan alam. Erwin, dkk (2009) menyebutkan kelapa sawit memiliki dampak sosial yang negatif antaranya terhadap keamanan pangan, perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan, sementara dampak lingkungan perubahan alam dan tata guna lahan, pencemaran air, erosi tanah, dan pencemaran kimia. Selanjutnya pembukaan lahan sawit telah berdampak terhadap konflik sosial.

Indonesia terdapat 500 kasus konflik sosial di sektor perkebunan kelapa sawit akibat persoalan hak atas tanah,

sengketa tenaga kerja, ketidakharmonisan kemitraan, kriminalisasi penduduk Desa dan skandal politik tingkat tinggi (Green Peace, 2010). Namun demikian selain dampak negatif penanam kelapa sawit juga memberikan dampak positif, diantaranya terserap tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk membuka usaha informal seperti warung dan perdagangan jasa (Effendi, 1996).

3.1.1 Interaksi Sosial

Pelaksanaan Program sawit tidak menimbulkan kontraversi dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya lokal masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mempersoalkan kenapa harus sawit. Dalam pandangan masyarakat “namanya juga bantuan, jadi apa yang ada diterima dulu. Mana tahu sekarang dapat bantuan sawit suatu saat nanti akan dapat bantuan jenis tanaman lain”.

Selain itu, bantuan sawit juga belum menimbulkan konfrontasi antara masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Beberapa informen menyatakan, “Saya tidak cemburu walaupun tidak mendapat bantuan sawit karena itu sudah rezeki orang”. Terdapat beberapa sebab masyarakat tidak mendapatkan bantuan sawit, diantaranya:

1. Tidak ada di desa ketika dibentuk kelompok dan diusulkan bantuan
2. Tidak dimasukkan dalam kelompok atau dipinggirkan

3. Tidak memiliki lahan
4. Dimasukkan dalam kelompok, tetapi bantuan diselewengkan anggota kelompok yang mendominasi.

Kenyataan ini dapat dipahami dari pernyataan para informen yang diwawancarai. Diantaranya:

“Saya tidak mendapat bantuan sawit dan tidak ada nama dalam kelompok karena pada saat pembentukan kelompok saya tidak ada di kampung karena sudah ditangkap dan berada di rumah tahanan (LP) karena kasus kepemilikan senjata api” (Racun, 17 Mei 2015).

Selanjutnya terdapat juga pembentukan kelompok atas inisiatif beberapa orang dalam masyarakat dengan mengajak teman terdekat atau keluarga. Pembentukan kelompok tidak dimusyawarahkan di tingkat gampong, sehingga sebahagian masyarakat tidak tahu ada program bantuan, dan mereka tidak diikuti dalam kelompok walaupun mereka tergolong dalam masyarakat miskin. Ini terjadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan dipandang “bodoh” oleh masyarakat lain, seperti pernyataan informan dalam FGD:

Saya tidak tahu ada bantuan sawit, tetapi saya tahu ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sawit. Katanya mereka cari sendiri bantuan kepada pemerintah dengan membentuk kelompok. Kemudian saya minta untuk dimasukkan ke dalam kelompok katanya anggota sudah cukup. Seorang informen lainnya menyatakan saya pernah

diminta KTP untuk dimasukkan dalam kelompok, tetapi setelah bantuan diperoleh saya tidak lagi diberitahu. Mereka membagikan antara sesama mereka saja (*dibagi ajau sabee kedroe-droe jih inan*) (FGD, 18 Mei 2015).

Berkaitan dengan kepemilikan lahan, menurut seorang ketua kelompok bahwa masyarakat yang tidak mendapat bantuan sawit karena mereka tidak memiliki lahan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur (bapak Ibrahim), bahwa masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak mendapat bantuan sawit karena pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembukaan lahan. Persoalan lahan pun bukan wewenang dinas, akan tetapi ada dinas terkait lainnya yang menyediakan lahan.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pemberian bantuan sawit kepada masyarakat oleh pemerintah tidak dibagikan kepada seluruh masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM. Walaupun demikian, konflik sosial tidak mengemuka sampai pada tahap konfrontasi. Ini karena sebahagian masyarakat masih berpegang pada nilai budaya Aceh, seperti yang dinyatakan oleh informan berikut;

“Cemburu pasti ada karena kami tidak mendapatkan bantuan tersebut, namun kami tidak sampai membenci kelompok dan orang yang menerima bantuan tersebut. Karena kami berpegang pada prinsip yang telah

dituangkan dalam pepatah Aceh “*Uneun Tak Wie Tarek*” (potong dengan tangan kanan tarik dengan tangan kiri)”.

Pepatah ini bermakna masyarakat memegang pada prinsip dan nilai kemandirian dan kerja keras orang Aceh, jika ingin sukses harus berusaha dan bekerja keras bukan hanya mengharap bantuan orang lain. Selain itu, aktivitas penanaman sawit telah membawa dampak positif bagi masyarakat petani, yaitu mengurangi satu kebiasaan negatif masyarakat, banyak menghabiskan waktu di warung kopi untuk membicarakan permasalahan— permasalahan yang tidak penting mulai dari permasalahan desa sampai permasalahan dunia yang tidak ada solusinya. Masyarakat Aceh mengistilahkannya “*seumula ateuh meh*” (bercocok tanam di atas meja kopi).

Selama memiliki kebun sawit kami tidak lagi menghabiskan waktu yang lama di siang hari di warung kopi, kecuali untuk minum dan berbincang sebentar. Setelah itu langsung pergi ke kebun sawit untuk bekerja. Akan tetapi untuk berinteraksi dengan masyarakat terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial tidak mengalami perubahan. Kami masih bisa mengikuti gotong royong dan acara-acara di kampung (FGD, 15 Mei 2015).

Masyarakat secara umum tidak mendapatkan bantuan dari kelompok GAM yang mendapat bantuan sawit akan tetapi untuk anak yatim mereka kasih terutama menjelang hari raya dan hari megang. Di Desa Buket Beureghang belum ada program bantuan sosial yang khusus dipotong dari hasil penjualan sawit

untuk program sosial. Akan tetapi di Desa Alue Udep ada mengumpulkan dana sosial dari hasil panen sawit. Mekanisme pemberian bantuan sosial, terutama untuk sumbangan pembangunan masjid sepuluh rupiah perkilogram. Namun ada desa yang dulunya memberi bantuan sosial berdasarkan mekanisme tersebut, akan tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi seperti di Suka Mulya.

Dampak perubahan sosial lainnya lain dari adanya kebun sawit yaitu terhadap gaya hidup. Dampak ini bisa dilihat dari salah satu pemilik kebun yang sudah menjadi toke besar. Orang yang ada uang pasti gaya hidupnya berubah, walaupun tidak banyak sedikit banyaknya ada. Misalnya karena sudah ada uang panen sebulan dua kali orang tersebut sudah berani ambil kredit mobil yang akhirnya memudahkan transportasi dan bisa berlibur dengan keluarga pada akhir pekan untuk makan–makan di luar atau untuk berekreasi.

Dampak perubahan gaya hidup juga dapat dilihat dari kebiasaan minum kopi. Kebiasaan minum kopi untuk orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi biasanya mencari tempat yang mewah dan berkelas, namun hal ini tidak terjadi di Kawasan Rantau Panjang dan Alue Bu. Para penerima bantuan sawit yang tingkat pendapatannya sudah lebih baik masih minum kopi di warung kopi di desanya bersama dengan masyarakat lainnya. Namun jika pemilik kebun sawit tinggalnya di desa lain maka sebelum ke lokasi kebun sawit dia

sudah minum di kampungnya terlebih dahulu. Namun sesekali ada juga dia minum di lokasi sekitar areal sawit.

Pola konsumsi masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan dan hal ini sudah lumrah karena daya beli masyarakat sudah tinggi. Dulu kalau mau beli kulkas atau HP tidak ada uang, sekarang sudah ada uang dari hasil panen sawit. Jadi masyarakat sanggup membeli kebutuhan tersebut. Sekarang walaupun kayu bakar banyak di sekitar rumah masyarakat memilih memasak dengan *Ricecooker* karena lebih praktis. Bahkan sekarang ada yang sudah membangun rumah baru yang permanen. Setelah menerima bantuan sawit dari pemerintah anggota kelompok yang pernah menerima bantuan sawit juga pernah menerima bantuan lainnya dari desa seperti raskin, bibit kacang kuning, kambing dan bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

3.1.2 Pendidikan

Penanaman sawit selain memiliki dampak terhadap interaksi juga memiliki dampak terhadap pendidikan anggota keluarga. Melalui hasil sawit para orang tua sudah dapat merancang pendidikan anak. Namun saat ini para orang tua belum memilih sekolah-sekolah yang unggul, akan tetapi pertimbangan pilihan pendidikan anak masih pada jarak tempuh yang terjangkau yang berada di sekitar Aceh Timur.

Sekolah negeri yang terdekat dengan tempat tinggal masih menjadi pilihan utama. Sehingga dilokasi yang tidak

memiliki Sekolah Tingkat lanjutan Atas (SLTA) masyarakat hanya menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SMP saja yang terletak dipusat kecamatan. Seperti yang terjadi pada masyarakat di dusun Suka Mulya.

Walaupun akses ke sekolah tidak terlalu susah artinya tidak perlu mengarungi sungai dan melawati jembatan yang rusak namun masyarakat tetap tidak menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat tinggi. Setelah tamat SMP anak-anak mereka langsung bekerja membantu orang tua dikebun dan di ladang, atau bekerja ditempat orang lain sebagai buruh tani.

Komoditi sawit dapat meningkatkan pendidikan anak-anak petani penerima bantuan akan terbantu, misalnya untuk kebutuhan sekolah anak sudah terpenuhi dari hasil panen. Kalau analogi sederhana untuk bayar uang sekolah sebulan sekali - masyarakat yang punya sawit 15 hari sekali panen, sehingga tidak ada persoalan dengan biaya pendidikan anak-anak mereka. Intinya dengan adanya bantuan sawit sangat terbantu pendidikan anak-anak.

3.1.3 Kesehatan

Dampak sawit terhadap kesehatan tidak begitu signifikan. Dari segi pola kesehatan lingkungan, masyarakat belum pernah menghadapi ancaman kesehatan akibat dari penanaman sawit bantuan tersebut. Semenjak penanaman sawit tersebut belum pernah ada kasus wabah penyakit yang menimpa masyarakat.

Selain itu pemerintah juga telah menyediakan layanan kesehatan gratis melalui program BPJS Kesehatan atau dulu di Aceh juga telah pernah ada program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sehingga masalah kesehatan tidak menjadi begitu bermasalah. Masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan tersebut daripada memilih ke pengobatan spesialis walaupun sebenarnya mereka mampu mengeluarkan biaya untuk berobat ke spesialis. Pertimbangan pilihan kesehatan masih mengandalkan puskesmas terdekat dan fasilitas kesehatan gratis serta obat bebas yang dijual dikios-kios terdekat.

Seiring dengan pembukaan kawasan baru akibat adanya penambahan areal kebun sawit, jumlah penduduk di sekitar kawasan itupun bertambah. Namun kenyataan ini tidak ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai untuk kawasan yang terpencil tersebut. Akibatnya masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan sawit untuk akses pelayanan kesehatan harus menempuh jarak yang cukup jauh yang terletak di pusat Kecamatan. Seperti masyarakat yang tinggal di kawasan Suka Mulya memerlukan waktu satu jam lebih untuk sampai ke Puskesmas Kecamatan Rantau Panjang.

3. 2 Dampak Lingkungan

Dampak buruk dari perkebunan monokultur kelapa sawit telah dirasakan jelas di Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Kamerun, Uganda, Cate de Ivory (Pantai Gading), Kamboja, Thailand, dan juga di Kolombia, Equador, Peru, Brasil,

Guatemala, Mexico, Nicaragua, serta Kosta Rica. Perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan hilangnya hutan-hutan primer unik yang sesungguhnya merupakan bagian dari tanah leluhur dan masyarakat. Ini mengakibatkan habisnya sumber air, makanan, obat, spiritualitas, dan budaya.

Padahal, penebangan hutan di dunia merupakan sumber terbesar kedua yang berperan dalam meningkatnya level karbon dioksida di atmosfer. Forum PBB yang menangani isu masyarakat adat (*United Nation Permanent Forum on Indigenous People*) menyatakan bahwa sekitar 60 juta orang adat di seluruh dunia terancam kehilangan tanah dan sumber kehidupannya akibat perluasan perkebunan untuk produksi agro-energi, 5 juta orang dari jumlah tersebut tinggal di Borneo, Indonesia (JKMA Aceh, 2011).

Di beberapa daerah Aceh, perluasan kelapa sawit juga sudah mulai bermasalah, antara lain; ***Pertama*** status kepemilikan lahan. Seringkali lahan yang diidentifikasi untuk produksi kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat, baik yang dimiliki secara pribadi atau secara komunitas. Lahan pertanian tersebut digunakan oleh penduduk setempat untuk menanam sayur-sayuran atau berupa lahan yang berhutan. Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Aceh tidak memiliki sertifikat tanah untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut, sehingga masyarakat seringkali tidak menerima kompensasi atas tanah yang diambil untuk perkebunan karena dianggap bukan miliknya.

Kedua, menghilangkan mata pencarian lokal. Perkebunan kelapa sawit tidak selamanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kecil. Perkebunan kelapa sawit bisa menciptakan ketergantungan pada komoditas tunggal, yang harganya ditentukan oleh pasar Internasional. Masyarakat akan kehilangan kontrol terhadap mata pencaharian mereka sendiri. Selain itu, petani perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri juga tidak berdaya karena kebanyakan pabrik pengolahan tandan buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar.

Ketiga, Dampak lingkungan berikutnya adalah setiap tahapan usaha pengembangan industri perkebunan kelapa sawit banyak sekali menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekologi, yang dimulai dari pembersihan lahan, pertumbuhan, hingga produksi. Pembersihan lahan dengan melakukan pembakaran adalah metode yang paling cepat dan murah yang sering dilakukan sehingga menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Api yang digunakan untuk membersihkan lahan juga seringkali menyebar di luar kontrol sehingga merusak hutan inti dan ekosistem di dalamnya serta membunuh binatang dan tumbuhan (fauna dan flora). Terkait bencana banjir, pohon kelapa sawit tidak dapat menyimpan air sebagaimana hutan asli.

Namun demikian, menurut beberapa orang informen penanaman sawit justru tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti tanah longsor dan banjir serta kekeringan yang biasanya diakibatkan oleh penebangan hutan untuk penanaman sawit. Masyarakat dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya

tanah longsor akibat dari *deforestation*, dengan menanam tumbuhan lain yang produktif dan memiliki nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sangat sedikit masyarakat yang memahami dan menyadari dampak negatif tanaman sawit terhadap lingkungan, khususnya air. Sebagaimana yang disampaikan oleh informen;

“Saya tahu sawit memang ada dampak kemarau dan banjir, sawit adalah tanaman yang banyak menyerap air. Saat sekarang ada pengurangan debit dan permukaan air tanah. Dulu untuk kebutuhan air bisa dengan menggali sumur, namun sekarang tidak lagi bisa menggali sumur karena airnya sudah sangat dalam. Akan tetapi bagi kami tidak ada pengaruhnya atau tidak ada masalah karena bisa mendapat air dengan membuat sumur bor. Untuk masalah banjir juga sudah semakin sering, akan tetapi sulit untuk menjelaskan apakah banjir tersebut disebabkan oleh sawit, karena sekarang banyak juga faktor lainnya seperti perubahan iklim”. (wawancara dengan Suparno, Suka Mulia, 14 Mei 2015).

Namun pada sisi lain, hanya sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa pelestarian hutan lebih penting karena untuk menjaga pelestarian lingkungan. Dengan banyaknya hutan iklimnya lebih sejuk. Akan tetapi masyarakat tidak punya kepastian terhadap hasil dari hutan untuk menjadi sumber ekonomi. Usaha sawit lebih pasti hasilnya sehingga kami lebih

memilih untuk menanam sawit dan menebang hutan, bahkan kami melakukan *replanting* terhadap tanaman yang saat ini harganya tidak baik, seperti karet. Hal ini diungkapkan oleh seorang informen sebagai berikut:

Menurut ayek, lahan sawit sekarang ini pengalihan fungsi lahan pertanian campuran yang tidak terawat karena ditinggalkan masyarakat semasa konflik. Lahan yang ditumbuhi tanaman liar seperti pete, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tanaman liar tersebut kami potong dan kami ganti dengan tanaman sawit (wawancara dengan Ayek, 14 Mei 2014).

Dalam pandangan masyarakat petani sawit sekarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan sehingga tanaman sawit bukan saja menggantikan tanaman liar yang memiliki nilai pelestarian hutan. Tetapi juga menggantikan tanaman karet yang dinilai oleh masyarakat memiliki nilai ekonomis lebih rendah walaupun memberi dampak terhadap lingkungan yang sejuk. Karet juga susah untuk dikerjakan karena masa kerjanya yang sangat ketat.

Harus dikerjakan setiap hari untuk merawat dan untuk memanen. Sementara kalau sawit hanya perlu waktu kerja 15 hari sekali. Sehingga sisa waktu lainnya bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan lain.

Lahan sawit yang kami tanam sekarang merupakan bekas *replanting* tanaman karet. Kami tidak lagi

menanam karet karena harganya yang tidak stabil dan masa kerjanya yang terlalu terikat. Tanaman sawit disini bukan inisiasi dari pemerintah tetapi kami sendiri yang mengusulkannya untuk menanam sawit (wawancara dengan Suparno, Suka Mulya, 14 Mei 2015) .

Selanjutnya masyarakat berpandangan bahwa mereka sebagai masyarakat awam lebih penting menyelamatkan manusia dari pada menyelamatkan hutan. Pada hakikatnya yang menyelamatkan hutan dan manusia adalah tuhan. Maka manusia hanya berusaha mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Agar hasilnya memuaskan maka ditanamlah sawit supaya mendapatkan hasil yang memuaskan bagi manusia. Apalagi selama ini pemerintah tidak pernah melarang penebangan hutan untuk menanam sawit.

“Hari ini pemerintah tidak melarang penebangan hutan bahkan memberi bantuan bibit, pembersihan lahan, pupuk dan sebagainya berarti itu boleh dan tidak berdampak, kalau berdampak pasti pemerintah tidak melaksanakan program seperti itu”. (wawancara dengan masyarakat penerima bantuan Abang Ayek, 14 Mei 2015)

BAB IV

KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN

4. 1 Kebijakan Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemberian kebun sawit kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik merupakan amanat MoU Helsinki yang tertulis dalam poin 3.2.5 yang berbunyi:

“Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: a). Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi

tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja; b). Semua tahanan politik yang telah memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja; c). Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja”.

Program pengembangan perkebunan sawit merupakan program pembangunan jangka panjang yang dicanangkan oleh pemerintah Aceh dengan mulai digalakkan kembali tanam sawit sejak tahun 2008. Menurut pemerintah Aceh, pengembangan sektor perkebunan sawit sangat strategis, mengingat kebutuhan akan sawit yang besar di pasaran dunia. Selain itu, masa panennya akan berlangsung berulang-ulang sehingga diperkirakan mampu melahirkan generasi baru yang lebih sejahtera (Tabloid Tabangun Aceh, 2011).

Kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan nilai ekspor paling tinggi di Aceh. Luas areal kebun sawit lebih dari 260,000 hektar dan memberi keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada sekitar 200,000 orang. Kelapa Sawit tersebar di sepanjang pesisir Barat dan Tenggara Aceh. Nilai ekspor (FOB) dari minyak kelapa sawit mentah (CPO)

yang diekspor dari Aceh saat ini walaupun sedang mengalami depresi harga global diperkirakan bernilai lebih dari US\$150 juta dollar Amerika. Oleh sebab itu, pengembangan sektor minyak kelapa sawit sebagai sumber penghasilan utama untuk produk- produk makanan dan bahan bakar merupakan salah satu prioritas tertinggi dalam visi Aceh Green (Fricke, 2008)

Kebijakan pengembangan kawasan agribisnis perkebunan kelapa sawit dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Aceh. Kebijakan tersebut telah ada sebelum tsunami, tetapi keberhasilannya terhambat oleh kurangnya sumber daya dan konflik. Membanjirnya sumber daya manusia dan keuangan pasca tsunami dan konflik yang berlimpah, maka kebijakan ini dijalankan kembali secara lebih serius oleh Dinas Perkebunan Aceh, Asian Development Bank (ADB) dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Perluasan dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi bagian penting dalam perekonomian di Aceh. Pemerintah Aceh juga sangat peduli dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan mempercepat realisasi program pengembangan perkebunan sawit. Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Qanun Aceh No 06 tahun 2012 tentang Perkebunan.

Oleh karena itu, program pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh, khususnya Aceh Timur

adalah dengan memberi bantuan sawit kepada masyarakat melalui kelompok yang mengusulkan bantuan kepada pemerintah.

Program bantuan sawit juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat umumnya sangat setuju terhadap program bantuan dalam bentuk sawit. Sawit dinilai dapat membantu perekonomian masyarakat karena sawit dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu sawit juga mudah dirawat, tidak menyita waktu, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Usaha perkebunan sawit juga membantu masyarakat biasa yang tidak menerima bantuan dengan dilibatkan sebagai penjaga, pemanen dan pengangkut buah sawit. Program bantuan Sawit ini merupakan pilihan berdasarkan aspirasi masyarakat dari proposal bantuan yang diajukan oleh masyarakat yang terdiri dari mantan kombatan GAM, korban konflik dan masyarakat biasa.

4. 2 Perencanaan Program Bantuan Sawit

Perencanaan merupakan tahap awal dari lahirnya sebuah kebijakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk program bantuan dapat lahir dari inisiatif pemerintah maupun dari inisiatif masyarakat. Program yang lahir dari inisiatif pemerintah merupakan program yang bersifat *top down*. Sedangkan program yang diinisiasi oleh masyarakat merupakan program partisipatif. Kedua jenis perencanaan tersebut tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Program bantuan sawit untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik direncanakan oleh pemerintah Aceh berdasarkan pada kebijakan pemerintah dan amanat MoU Helsinki. Setelah kebijakan ini disusun, pemerintah Aceh kemudian menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemberdayaan melalui program bantuan sawit. Rencana ini kemudian direspon oleh masyarakat melalui pengiriman proposal kepada pemerintah Aceh.

Dalam perencanaan program bantuan sawit, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam menyusun program bantuan dari tahap awal perencanaan. program sawit ini sudah direncanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat hanya tahu ada program bantuan sawit, sehingga mereka membuat proposal untuk meminta bantuan tersebut. Setelah itu masyarakat tidak tahu bagaimana proses pada tingkat pemerintah secara mendetil.

Menurut pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini Dinas Kehutan dan Perkebunan, bantuan yang diberikan bersifat aspiratif, sesuai usulan dari kelompok tani setempat, oleh kerana itu, maka berpeluang ada masyarakat sendiri yang mengusulkan proposal untuk diberikan bantuan sawit. Pernyataan ini sebenarnya bertentangan dengan yang disampaikan oleh masyarakat yang menerima bantuan.

“Tidak semua masyarakat tahu jika ada program pemberdayaan yang direncanakan oleh pihak pemerintah daerah karena selama ini hanya orang-orang tertentu

saja yang memperoleh informasi. Jika ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan informasi itu tidak disampaikan kepada masyarakat umum di Desa, bahkan kepada anggota kelompok sekalipun sebahagian mereka tidak mengetahui bantuannya sudah diberikan atau belum” (FGD dengan masyarakat Seuneubok Buya Idi Tunong, 17 Mei 2015).

4.3 Pelaksanaan Program Bantuan Kelapa Sawit

Pemberian bantuan sawit kepada mantan kombatan GAM dan Korban Konflik di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan proposal dan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Penerima atau anggota kelompok serta kriterianya ditentukan oleh kelompok itu sendiri, pemerintah tidak lagi mengeceknya. Petugas pemerintahan menganggap hal itu sudah selesai, karena kepala desa, camat dan panglima sagoe sudah melakukan hal tersebut.

Semua proposal yang dikirimkan ke dinas terlebih dahulu diketahui dan ditandatangani oleh tiga lembaga tersebut. Jika pun terdapat orang kaya di dalamnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur tidak berhak mencoret nama mereka, karena hal itu menjadi tanggung jawab kelompok. Tugas pemerintah daerah kabupaten (Dinas kehutanan dan perkebunan) memverifikasi terhadap Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) apakah sesuai dengan usulan proposal. Petugas Dinas juga hanya memverifikasi apakah calon penerima memiliki lahan yang akan digunakan untuk penanaman sawit yang akan diterima.

Para penerima program bantuan sawit, anggota kelompoknya bervariasi yaitu mantan Kombatan GAM, korban konflik dan juga masyarakat biasa. Syarat penerima bantuan adalah kepemilikan lahan untuk penanaman bibit sawit. Dalam penentuan CPCL melibatkan masyarakat langsung, dinas hanya memfasilitasi dalam hal persediaan jumlah bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan penunjang seperti alat dodos dan grek (alat angkut tandan sawit).

Namun dari hasil verifikasi dengan petugas lapangan, dalam hal penentuan proposal mana yang akan diprioritaskan sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan kekerabatan kelompok yang mengajukan proposal dalam mencari informasi dan mengawal proposal mereka.

Ada beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan sawit ini. Kekurangan pelaksanaan tersebut antara lain pihak dinas tidak melakukan survey awal secara khusus terkait dengan kesesuaian lahan dengan program bantuan yang diberikan. Pihak pemerintah juga tidak melakukan studi analisis terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penanaman sawit yang akan dilakukan seperti kajian AMDAL dan analisis lainnya yang terkait dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, dinas hanya bergantung kepada proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat. Begitu juga dengan analisis atau evaluasi dampak terhadap lingkungan dari penanaman sawit bantuan tersebut. Jadi dikarenakan tidak pernah

ada analisis khusus, maka pihak dinas tidak mampu menjelaskan dampak lingkungan dari penanaman sawit tersebut.

4. 4. Monitoring Dan Evaluasi Program Bantuan Sawit

Proses penyaluran bantuan, berdasarkan hasil wawancara pihak Dinas tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala. Akibatnya penyaluran bantuan bibit sawit oleh dinas ada yang belum ditanam sampai saat ini, dan ada masyarakat menerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.

Selain itu, sebahagian masyarakat penerima mesti mengeluarkan uang ongkos antara Rp 1000 per batang bibit sawit, sehingga masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan uang tersebut tidak dapat memperoleh bantuan bibit sawit. Untuk itu, monitoring perlu dilakukan terutama dalam memastikan penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan prinsip keadilan yaitu memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

4. 5. Model Pemberdayaan Untuk Pengentasan Kemiskinan

Pembukaan areal sawit bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM di kabupaten Aceh Timur telah dilakukan sejak tahun 2009. Penanaman sawit sebagian dilakukan pada lahan baru tetapi ada juga yang digunakan

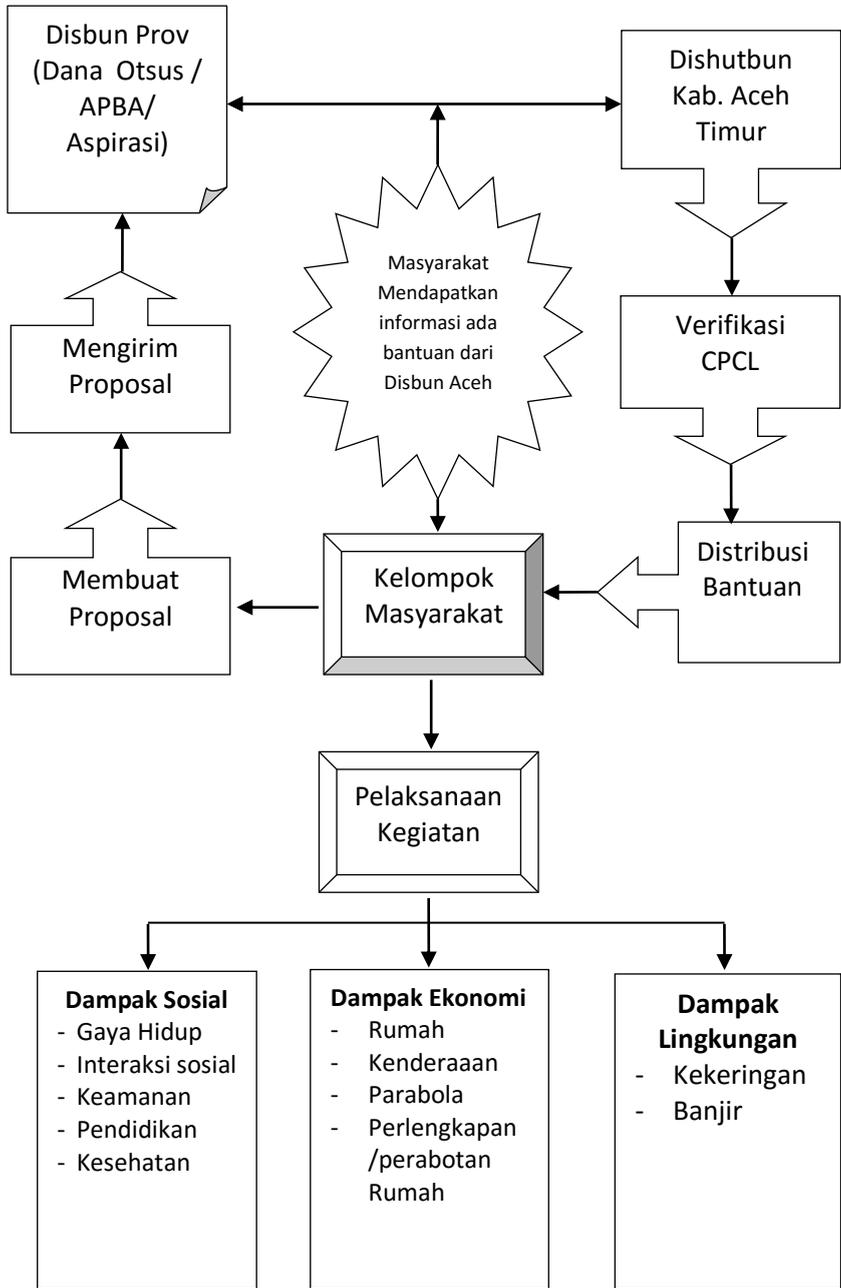
pada lahan yang ditinggalkan ketika konflik yang sebelumnya difungsikan untuk tanaman *polikultur*.

Namun semua lahan ini baik lama maupun baru adalah merupakan lahan milik pribadi masyarakat, pemerintah hanya memberi bantuan biaya kliring, bibit, pupuk, biaya tanam, dan alat. Bantuan tersebut diusulkan oleh masyarakat melalui kelompok masing-masing kepada pemerintah Aceh berdasarkan informasi yang didengar dari pegawai pemerintah. Kemudian pemerintah Provinsi mengintruksikan kepada pemerintah kabupaten (melalui dinas kehutanan dan perkebunan) untuk melakukan verifikasi ke lapangan dan memastikan kelompok pengusul tersebut memiliki lahan.

Dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten menunjuk seorang pengawas lapangan untuk berkoordinasi dengan ketua kelompok dalam usaha memastikan semua bantuan dimanfaatkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan kenyataan ini dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui komoditi sawit yang terjadi di kabupaten Aceh Timur adalah berbasis *top down dan bottom up*, di mana program penanaman sawit sebagai program pengentasan kemiskinan telah ditentukan oleh pemerintah, tetapi untuk mendapatkan bantuan sawit masyarakat harus proaktif mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Kenyataan ini tidak memenuhi standar pemberdayaan yang ideal, karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan menerapkan sistem kompetisi dikalangan

masyarakat untuk memperoleh bantuan sehingga masyarakat yang lemah pendidikan dan jaringan informasi tetap tersisihkan dari program pemberdayaan. Apalagi kriterianya tidak memprioritaskan masyarakat miskin. Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, Pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharuan atau tenaga pendamping. Berdasarkan gambaran pemberdayaan yang dilakukan melalui komoditi sawit, secara skematis model kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Aceh melalui pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan sebagaimana berikut:

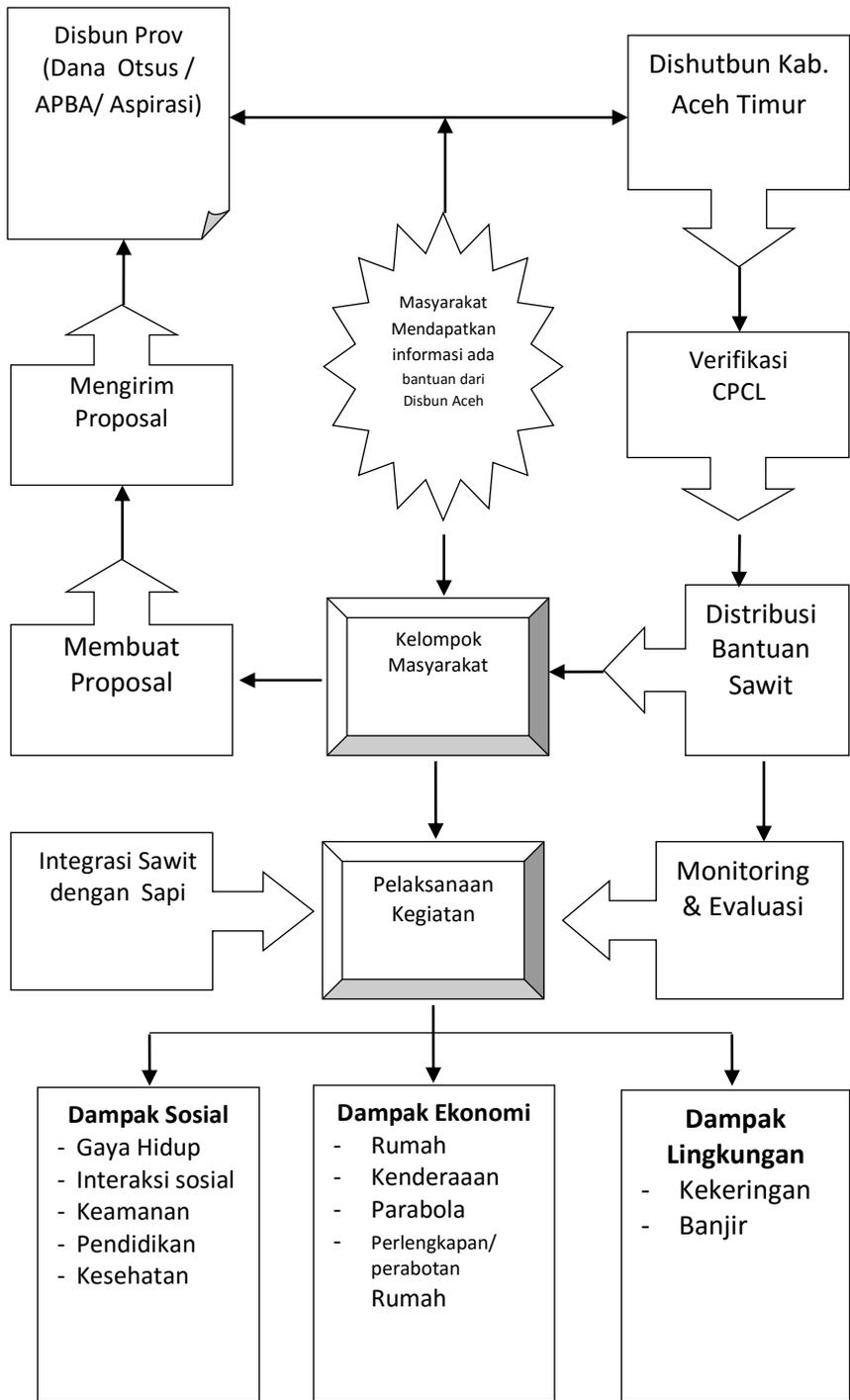


Gambar di atas menjelaskan menunjukkan bahwa:

1. Masyarakat mendapat informasi adanya bantuan pertanian dari Pemerintah Aceh, kemudian mencari kebenaran dan kepastian tersedianya bantuan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Masyarakat membentuk kelompok petani secara bersama.
3. Kelompok petani menyiapkan proposal bantuan pertanian.
4. Mengirimkan proposal bantuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh setelah mendapat rekomendasi dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur untuk pelaksanaan program.
6. Dinas Kabupaten melakukan verifikasi dan seleksi kelompok dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.
7. Dinas Provinsi menyalurkan bantuan kepada kelompok tani yang disetujui dan bantuan tersebut didampingi oleh petugas dari dinas kabupaten untuk memastikan bantuan telah diterima oleh ketua kelompok.
8. Pelaksanaan program yaitu bantuan sawit diterima oleh kelompok tani ditanam, dirawat, hingga memetik hasil panen.

Model pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas akan lebih maksimal pelaksanaannya jika pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan tersebut. Hal ini penting dilaksanakan sebab dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa ada bibit sawit bantuan pemerintah yang sampai hari ini belum ditanam oleh masyarakat dengan berbagai alasan, seperti lahan belum siap, bibit yang dikasih terlalu kecil sehingga tidak ditanam dulu takut dimakan hama. Seperti yang terjadi di kawasan Ranto Panjang dan Idi Tunong.

Oleh karena itu model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan baik oleh dinas ataupun melibatkan mitra lainnya. Maka model pemberdayaan ekonomi yang diterapkan memerlukan penyempurnaan, dalam hal ini kami menawarkan model yang disempurnakan yaitu sebagai berikut:



Jika monitoring terus dilakukan oleh pemerintah sampai masa panen maka permainan harga oleh pihak swasta dapat ditekan oleh pemerintah. Jika permainan harga dipantau oleh pemerintah maka yang untung adalah petani sawit, kalau tidak maka akan terjadi sebaliknya. Petani yang berdaya sesuai dengan harapan pemerintah menjadi utopia belaka.

Selain itu, monitoring juga diperlukan dalam program bantuan sawit ini supaya tidak terjadi pergantian anggota kelompok penerima secara sepihak oleh ketua kelompok tanpa memberi tahu anggota sebelumnya yang telah mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pembentukan kelompok. Jika hal ini terjadi maka dikhawatirkan akan muncul konflik sosial di dalam masyarakat. Apabila konflik sosial muncul kestabilan sosial dalam masyarakat terganggu.

Jika integrasi sawit dengan sapi dapat dilaksanakan maka manfaat yang akan diperoleh antara lain; (a) rumput dalam kebun sawit dapat dimakan langsung oleh sapi tanpa harus dipotong oleh petani sehingga hemat waktu dan tenaga serta areal kebun sawit menjadi bersih, (b) Kotoran sapi dalam jumlah banyak bisa dijadikan biogas. (c) Sambil menjaga sapi bisa mengurus kebun sawit.

Jadi penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang kami dimasukkan dalam penyempurnaan model pemberdayaan-an yang dilakukan oleh pemerintah sekarang; pertama unsur monitoring dan kedua integrasi program. Dalam pelaksanaan program integrasi sawit dan sapi ini juga kami

berharap akan terjadi integrasi program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) sehingga program pemberdayaan dengan model ini akan lebih cepat terlaksana.

4. 6 Model Pemberdayaan Bidang Pertanian

Sejak masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda, pembangunan pertanian selalu mendapat perhatian pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Tidak saja terkait dengan penyediaan pangan bagi rakyat, tetapi juga sebagai sumber penghasilan (tambahan) dari penjualan hasil-hasil pertanian (*cash crops*). Dari sisi kepentingan pemerintah, pembangunan pertanian sangat penting artinya sebagai penyedia bahan-mentah dan bahan-baku industri, penghasil devisa ekspor, dan perluasan kesempatan dan serapan tenaga-kerja.

Selama pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-2008), pembangunan pertanian semakin memperoleh perhatian, utamanya terkait dengan perannya untuk mendukung pembangunan industri. Dimulai dengan program BIMAS-SSBM (bimbingan masal swasembada bahan makanan) pada 1967, program BIMAS terus dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong, BIMAS Nasional yang Disempurnakan (BNYD), Intensifikasi Masal (INMAS), Intensifikasi Khusus (INSUS), dan SUPRA INSUS.

Pada masa-masa ini, pembangunan pertanian telah membuktikan keberhasilannya dalam peningkatan jumlah dan

mutu produk-produk pertanian, utama-nya beras. Tetapi kehidupan petani justru semakin menurun dan terdampak dijadikan “tumbal” pembangunan industri. Nilai-tukar produk-produk pertanian terhadap kebutuhan petani semakin menurun, bahkan beragam insentif dan subsidi yang pernah diberikan kepada petani sejak awal dasawarsa 1970-an, berangsur-angsur semakin menurun dan sebagian telah ada yang dihapuskan.

Seiring dengan itu, melalui slogan “*politik No, berkarya Yes*” keberadaan organisasi petani sebagai kekuatan politik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah sangat dikendalikan. Satu-satunya organisasi petani yang diakui dan keberadaannya memperoleh dukungan pemerintah hanyalah organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang diizinkan berkembang sebagai kekuatan politik pendukung pemerintah yang sedang berkuasa.

Memasuki era reformasi yang bergulir sejak awal 1998, kondisi pertanian di Indonesia semakin menunjukkan penurunan. GEMA PALAGUNG (Gerakan Menanam Padi, Palawija dan Jagung) yang dibarengi dengan penyaluran Kredit Usahatani (KUT) tidak banyak memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan yang terjadi adalah membengkaknya tunggakan KUT karena dananya diselewengkan oleh pihak yang terkait dalam penyalurannya.

Semakin memburuknya pembangunan pertanian telah menyadarkan pemerintahan Presiden SBY untuk mendeklarasikan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (RPPK) pada tahun 2005. Sejak saat itu, keberhasilan pembangunan pertanian dilaporkan semakin menunjukkan keberhasilannya, seperti dicapainya swasembada beras pada tahun 2008 (meskipun tercatat masih mengimpor beras hampir sebanyak 300.000 ton) dan swasembada jagung pada 2009.

Namun demikian, prestasi petani seperti itu, belum memperbaiki apresiasi pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain terhadap kehidupan petani. Yang terjadi, justru petani selalu kesulitan memperoleh pupuk pada saat dibutuhkan. Demikian juga dengan pemasaran produknya, mereka selalu dalam kedudukan posisi-tawar yang lemah terhadap pedagang dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain.

Seiring dengan itu, meskipun gerakan reformasi telah berhasil mengubah sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralisasi, tetapi keberadaan organisasi petani sebagai kekuatan politik belum juga menunjukkan kebangkitannya, sehingga posisi-tawar petani terhadap pemangku kepentingan yang lain selalu kalah. Karena itu, sejak 40 tahun terakhir, kehidupan petani di Indonesia tidak lebih baik dari yang digambarkan oleh James Scott (1976), yaitu *Seperti orang yang terendam air, yang airnya sampai ke bibir. Jika sedikit saja bergerak, airnya akan masuk ke mulut, dan membawanya tenggelam. Oleh sebab itu, mereka lebih baik diam saja ,agar tetap selamat.*

Petani-petani yang dalam kondisi termarjinalkan seperti itu, mereka sadar betul untuk lebih baik tetap diam demi keselamatannya. Sebab, jika (ketahuan) bergerak, pasti akan ditindas dan mereka pasti akan kalah, bahkan dihabisi seperti yang pernah dialami oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) di masa Orde Baru.

4.6.1 Kelompok Tani di Indonesia

Seiring dengan dikembangkannya program inten-sifikasi pertanian melalui Program BIMAS/INMAS pada penghujung dasawarsa 1960-an, telah dikembangkan beragam bentuk Kelompok Tani di Indonesia, seperti; Kelompok Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok Pemberantasan Hama, Kelompok Demomnstrasi Area, Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan (Kelompen Sipedes), dan lain-lain.

Sejak dikembangkannya Proyek Pemberdayaan masyarakat Pertanian Pangan (*National Food Crops Extension Projects/NFCEP*) di tahun 1976, semua kelompok tersebut dilebur dalam Kelompok Tani Hambaran dan atau Kelompok Tani Domisili, dan kelompok-kelompok tersebut berubah fungsinya menjadi Kelompok Kegiatan yaitu Kelompok Tani yang dibentuk guna melakukan kegiatan-kegiatan khusus.

Selain itu, belajar dari pengalaman NFCEP tersebut, keberadaan Kelompok Tani kemudian diresmikan pembentukannya melalui Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor

130/Mentan/II/1979, sehingga Kelompok Tani bukan lagi menjadi kelompok informal, melainkan sudah berubah menjadi Kelompok Formal.

Dalam perjalanannya, Kelompok Tani yang semula dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pertanian, sejak dikembangkannya program Intensiifikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979, keberadaan Kelompok Tani berubah menjadi instrumen pengelolaan usahatani. Sebab, melalui INSUS, usahatani tidak lagi dikelola secara perorangan (individual) melainkan dilaksanakan secara bekerja-sama antar petani dalam satu kelompok-hamparan.

Keberadaan Kelompok Tani sebagai instrumen pengelolaan usahatani seperti itu, kemudian dikembangkan lagi pada pelaksanaan SUPRA INSUS, yang memperluas unit pengelolaan usahatani dari kelompok Tani ke Gabungan Kelompok Tani. Lebih lanjut, memasuki masa reformasi, keberadaan Kelompok Tani tidak hanya dijadikan instrumen pengelolaan usaha-tani, melainkan lebih dikembangkan lagi menjadi instrumen pembangunan ekonomi perdesaan melalui program *Corporate Farming* di tahun 2000, Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) tahun 2004, dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di tahun 2008.

Berkaitan dengan perkembangan kelompok tani di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Keberadaan kelompok tani sebelum NFCEP, lebih bersifat sebagai kelompok-sosial yang bersifat informal

- (b) Memasuki era NFCEP, kelompok tani dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pertanian.
- (c) Pada era INSUS dan SUPRA INSUS sampai dengan akhir 1990-an, kelompok tani telah dikembangkan sebagai instrument pengelolaan usahatani, utamanya dalam upaya peningkatan produksi dan pelestarian swa-sembada beras
- (d) Melalui *Corporate Farming*, LUEP, dan PUAP, diupayakan pengembangan kelompok-tani menjadi suatu bentuk korporasi usahatani.
 - 1) Melalui *Corporate Farming*, pengelolaan usaha-tani tidak lagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing petani sebagai pemilik lahan usahatani, tetapi sepenuhnya dikelola oleh *Corporate Farming*. Petani sebagai pemilik lahan hanya sebagai “*buruh-tani*” di lahannya sendiri, dan akan menerima bagian pendapatan *corporate* secara proporsional berdasar-kan luas lahannya.
 - 2) Melalui LUEP, kelompok-tani diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk.
 - 3) Melalui PUAP, kepada setiap GAPOKTAN diberikan hibah sebesar Rp. 500.000.000/ Gapoktan, untuk dikelola sebagai pinjaman kepada anggota-anggota Kelompok-tani/Gapoktan untuk pengembangan agribisnis

Namun, kesemua upaya itu belum secara jelas mengarah pada pengembangan Kelompok tani / Gapokatan sebagai lembaga (yang dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani untuk mengembangkan unit usaha yang memiliki daya tawar dan mampu membangun kemitraan yang sinergis dengan beragam kelembagaan pembangunan pertanian yang lain.

4.6.2 Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani

Seperti telah dikemukakan, kehadiran Kelompok-tani sebenarnya sudah mulai dikenalkan sejak awal tahun 1970-an, terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pertanian dalam bentuk: kelompok-tani pemakai air, kelompok pemberantasan hama, dan lain-lain. Tetapi pada saat itu kelompok-tani masih bersifat informal sebagai kelompok-sosial yang dibentuk dan dikembangkan atas dasar kepentingan bersama.

Sejak diluncurkannya Proyek Pemberdayaan masyarakat Pertanian Tanaman Pangan (*National Food Crops Extension Project*) pada akhir tahun 1976, pengembangan kelompok-tani mulai menemukan bentuknya yang lebih formal, seiring diadopsinya sistem kerja LAKU (Latihan dan Kunjungan) atau *Training and Visit* (TV). Pengembangan kelompok-tani kemudian terus dikem-bangkan menjadi kelompok yang lebih formal melalui Surat Edaran Menteri Pertanian No. 130/Mentan/II/ 1979, yang membagi habis seluruh lahan hamparan di seluruh Indonesia ke dalam Wilayah Kerja

Kelompok-tani (WILKEL).

Pada saat program Intensifikasi Khusus (INSUS) yang dilaksanakan sejak tahun 1979 dikembangkan menjadi SUPRA INSUS pada tahun 1987, keberadaan kelompok-tani dikembangkan lagi menjadi Gabungan kelompok-tani (GAPOKTAN).

Pengembangan GAPOKTAN akhir-akhir ini semakin diintensifkan, terkait pelaksanaan program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) yang memberikan bantuan permodalan sebanyak Rp. 100.000.000/Gapoktan. Perubahan kelompok-tani menjadi GAPOKTAN yang semakin disadari potensinya untuk dikembangkan menjadi kelembagaan agribisnis di perdesaan itu, memberikan inspirasi pengembangan GAPOKTAN menjadi dua bentuk pilihan, yaitu: menjadi Asosiasi Petani, atau Korporasi (Badan SDM, 2008).

4.6.3 Ragam Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertanian

Telaahan terhadap ragam kegiatan pemberdayaan masyarakat sektor pertanian, difokuskan kepada tiga kegiatan pokok, yaitu:

- (a) Pengembangan Usaha Agribisnis
- (b) Kegiatan ini dilatar-belakangi oleh kenyataan bahwa belum semua pelaku usahatani memahami kegiatan pertanian sebagai satu kesatuan sistem agribisnis
- (c) Pengembangan Badan Usaha Milik Petani, yaitu suatu inovasi kelembagaan yang dilatar-belakangi oleh kurang

berfungsi dan terintegrasinya kelembagan usaha agrobisnis dalam mendukung peningkatan produksi, pendapatan petani, dan peningkatan daya-saing kegiatan agrobisnis

- (d) Pengembangan Usaha Peternakan Terpadu, yang dilatar belakangi semakin pentingnya optimasi pemanfaatan sumberdaya dan efisiensi usaha peternakan yang di samping melakukan intensifikasi usaha peternakan juga diinte-grasikan dengan pemanfaatan limbah dan pengembangan usaha tani organik.

4.6.4 Pengembangan Usaha Agrobisnis

Kelemahan umum dalam pengelolaan usaha tani adalah sering terpusat pada kegiatan intensifikasi usahatani (*on-farm*) yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus keuntungan usaha tani atau pendapatan petani. Namun dalam praktek, intensifikasi yang berhasil meningkatkan produktivitas, tidak selalu diikuti dengan efisiensi usahatani maupun pendapatan petani. Menghadapi masalah ini, sejak medio 1980-an, Saragih (1986) tidak henti-hentinya mengemukakan konsep agrobisnis, sebagai cara pandang baru tentang kegiatan pertanian sebagai subsistem dari sistem agrobisnis yang terdiri dari:

- (a) Sub-sistem produksi dan distribusi input dan perlengkapan usaha tani.
- (b) Sub-sistem budidaya pertanian.

- (c) Sub-sistem pengolahan hasil (agro-industri).
- (d) Sub-sistem pemasaran hasil.
- (e) Sub-sistem pendukung (permodalan, pemberdayaan masyarakat, konstruksi, transportasi, dan jasa-lainnya).

Terkait dengan pemahaman ini, maka pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan melalui:

- (a) Penyadaran kepada semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian, utamanya jajaran birokrasi dan petani sebagai pelaku/pengelola usahatani, melalui:
 - 1) Sosialisasi kepada jajaran birokrasi, utamanya pejabat lingkup pertanian.
 - 2) Pelatihan, penataran, dan lokakarya bagi petugas dan penyuluh pertanian.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat kepada petani, baik secara masal, kelompok, maupun perorangan.
- (b) Peningkatan koordinasi antar pejabat (dinas/instansi terkait) lingkup kegiatan agrobisnis, utamanya keterpaduan dan sinergi pelayanan kepada (masyarakat) petani.
- (c) Pengembangan kegiatan agrobisnis-terpadu oleh petani, kelompok tani, dan atau Gabungan Kelompok-Tani (GAPOKTAN).

DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN MODEL PEMBERDAYAAN TERPADU

5.1 Proses Pembentukan Model Integrasi Sawit dan Sapi dalam Pemberdayaan Ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh pedesaan pasca konflik, Pemerintah Aceh telah melakukannya melalui bantuan pertanian perkebunan dan peternakan, di antaranya bantuan sawit dan sapi. Khususnya di Aceh Timur, luas areal kelapa sawit bantuan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik telah mencapai sekitar 3.726 Ha, yang tersebar pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang (Dokumen Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014).

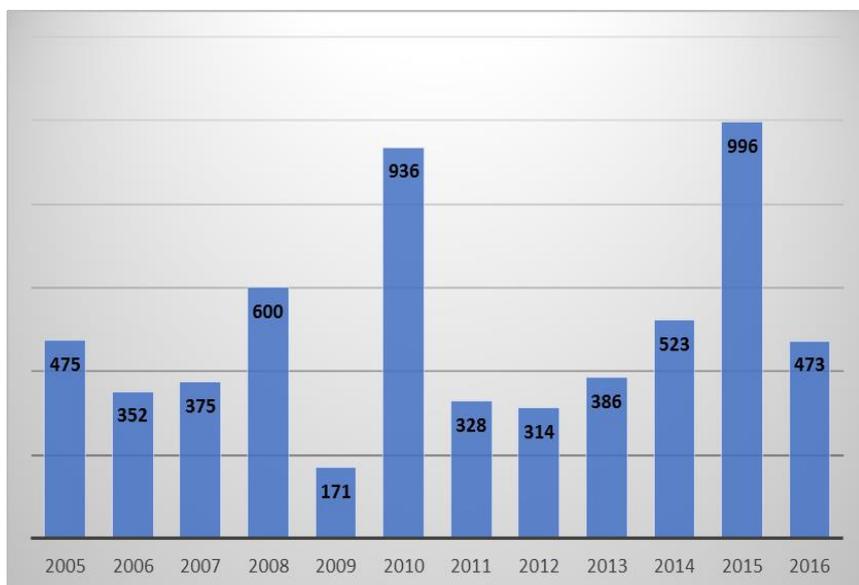
Dengan demikian, hanya satu kecamatan saja yang tidak mendapat bantuan untuk pengembangan kelapa sawit yaitu Kecamatan Simpang Jernih.

Sebanyak 4 (empat) kecamatan yaitu Indra Makmur, Rantau Peureulak, Peureulak dan Peureulak barat mendapat bantuan lebih dari 400 Ha. yang paling kecil perolehan bantuan kelapa sawit dari Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah Kecamatan Serbajadi, Darul Falah, Banda Alam, Idi Rayeuk dan Darul Ihsan yaitu kurang dari 50 Ha. Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Aceh Timur, jumlah bantuan kelapa sawit yang diberikan untuk mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik adalah mencapai 18,8%. Besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap orang adalah rata-rata seluas 1,1 Ha (Saifuddin, dkk., 2015).

Selain bantuan sawit, sebagian masyarakat petani juga telah memperoleh bantuan sapi. Namun sebagian masyarakat hanya memperoleh salah satu dari dua bantuan tersebut, dan bahkan sebagian lainnya tidak memperoleh kedua bantuan tersebut, sehingga dari sejumlah areal perkebunan sawit tersebut tidak semua masyarakat petani sawit memelihara sapi. Berdasarkan kenyataan ini model integrasi yang dilakukan pun bervariasi. Sebagian masyarakat peternak sapi melepaskan sapihnya di dalam kebun sawit sendiri, dan sebagian masyarakat lain melepaskan sapihnya ke dalam kebun sawit orang lain atas izin

pemilik kebun, baik dilepaskan secara angonan maupun secara liar pada siang hari. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 jumlah bantuan sapi dari pemerintah kepada masyarakat mencapai 5.929 ekor yang tersebar diberbagai kecamatan dalam kabupaten Aceh Timur. Adapun rincian lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 5.1: Jumlah Bantuan Sapi dari Pemerintah Sejak 2005 S/d 2016



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur, 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pemerintah memberikan bantuan sapi kepada masyarakat. Oleh karena itu jika bantuan ini dikelola dengan baik maka

masyarakat akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jumlah sapi bantuan pemerintah di Aceh Timur sampai Desember 2016 mencapai 5.929 ekor (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur, 2017). Adapun Luas areal kelapa sawit bantuan pemerintah hingga tahun 2014 seluas 3.726 Ha, yang tersebar pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang (Dokumen Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014).

Jika sapi bantuan tersebut dilepas dalam setiap hektar kebun sawit bantuan maka setiap hektar kebun sawit akan mendapat 1.5 ekor rata-rata (ada yang satu ekor ada yang dua ekor sapi). Selain bantuan sapi pemerintah juga memberikan bantuan kerbau, kambing, ayam dan itik dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya. Adapun jumlah bantuan tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 : Jumlah bantuan Itik, Ayam, Kambing dan Kerbau sejak 2005 s/d 2016 dari Pemerintah Aceh Timur.

NO	TAHUN PENYEBARAN	JENIS TERNAK			
		Itik	Ayam	Kambing	Kerbau
1	2005	-	-	-	-
2	2006	-	-	1800	-
3	2007	-	-	400	40
4	2008	-	-	375	50

5	2009	-	-	700	-
6	2010	6980	1850	-	-
7	2011	-	-	150	-
8	2012	2000	35990	215	-
9	2013	6898	14300	818	-
10	2014	4666	-	312	22
11	2015	1133	12528	428	4
12	2016	330	-	916	6
JUMLAH		22007	64668	6114	122

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur, 2016

Namun demikian, kebanyakan sapi yang dipelihara oleh masyarakat adalah milik pribadi atau milik orang lain yang dikelola secara bagi hasil (*mawah*)⁴ atau (*meudua laba*)⁵.

⁴Mawah dikenal di kalangan masyarakat Aceh sebagai suatu akad kerjasama dalam usaha pertanian dan peternakan, dimana seseorang atau pemilik modal (lahan atau ternak) memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang disepakati. Umumnya perjanjian dilakukan hanya dengan lisan mengikuti aturan adat yang berlaku di masyarakat. Menurut Abdurrahman (2015) pada prakteknya Mawah mempunyai kemiripan arti dengan sistem mudharabah dalam Islam, yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahibul mal/pemilik modal) memberikan hartanya dan pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola usaha dengan perjanjian akan dibagi keuntungan menurut nisbah (ratio) yang disepakati bersama. Namun demikian, praktik Mawah berbeda dengan praktik Sistem Mudharabah yang dijalankan oleh Perbankan Syari'ah yang ada di Indonesia.

Sementara sapi bantuan jumlahnya sangat terbatas, hanya lima sampai sepuluh ekor per kelompok. Adapun sapi milik pribadi masyarakat adalah berjenis sapi kampung atau dikenal sapi kacang.

Sementara sapi bantuan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah sapi jenis Bali yang diberikan kepada masyarakat yang mengusulkan secara berkelompok dengan jumlah yang berbeda untuk setiap kelompok, seperti Kelompok Petani di Seneubok Dalam Nurussalam mendapat 5 ekor sapi bali untuk sepuluh orang anggota kelompok. Sementara Kelompok Petani di Alue Dong-Dong mendapat 10 ekor sapi bali untuk 5 orang anggota kelompok. Semua sapi bantuan tersebut adalah betina, yang dijadikan sebagai induk pengembangbiakan. Namun dalam proses pengembangbiakan dilakukan inseminasi buatan dengan dua jenis sapi, yaitu sapi Bali dan sapi Brahmana.

Sistem Mawah tidak mengenal pemilik modal tidak dirugikan jika usaha gagal. Jika gagal usaha kedua pihak menanggung kerugian. Contohnya jika sapi mati atau kecurian maka pemiliknya tidak dapat meminta ganti rugi kepada pengelola, atau apabila pertanian gagal panen maka pemilik lahan tidak dapat menuntut sejumlah hasil panen yang disepakati. Untuk ternak biasanya keuntungan dua (50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola). Sementara untuk pertanian pembagian keuntungan tidak demikian, pemilik lahan memperoleh keuntungan dihitung berdasarkan luas lahan dan mempertimbangkan hasil panen.

⁵ Meudua laba merupakan istilah syarikat atau musyarakah suatu usaha yang dilaksanakan oleh dua pihak dengan keuntungannya juga dibagi dua. Istilah dalam operasinya digunakan secara umum pada semua jenis usaha yang dikelola bersama. Sementara istilah mawah lebih khusus digunakan untuk usaha tani dan usaha ternak walaupun kadang-kadang sebagian masyarakat juga menggunakan istilah meudua laba dalam usaha tani dan ternak.

Perbedaan sistem integrasi sapi, pemeliharaan secara bebas liar dan pemeliharaan anongan nampaknya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tradisional dan pengalaman masyarakat petani tentang pemeliharaan dan penggemukan ternak. Hal ini terlihat dari latar belakang peternak peternak. Model pertama ditemukan pada peternak dari kalangan suku bangsa Aceh dan model yang kedua ditemukan pada peternak dari suku bangsa Jawa yang memperoleh pengetahuan pengalaman dari kawan dan keluarga di Sumatera.

Ditambah lagi mereka belum mendapatkan pencerahan pengetahuan dan teknologi modern untuk mengintegrasikan sapi dan sawit dari pihak akademisi dan pemerintah, sehingga tidak ada keseragaman model integrasi yang dijalankan. Integrasi yang dilakukan mereka hanya untuk memanfaatkan rumput atau gulma di areal perkebunan sawit yang diperkirakan ketinggian sawitnya tidak dapat lagi dijangkau oleh sapi yang mengganggu pertumbuhan sawit. Hal ini karena areal luas yang bebas untuk pemeliharaan atau pelepasan sapi untuk merumput sudah berkurang akibat meluasnya pembukaan areal kosong yang ditanami sawit oleh masyarakat.

Berikut ini adalah uraian hasil wawancara dengan beberapa informan yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Menurut informan sebenarnya pemeliharaan sapi di samping menanam sawit adalah untuk menambah penghasilan. Pilihan lokasinya dalam kebun sawit karena tidak tersedia lagi lokasi lain untuk pelepasan sapi yang dipelihara oleh masyarakat, “Pemeliharaan

sapi di dalam kebun sawit karena lokasi untuk melepaskan sapi mencari makanan sudah terbatas akibat tanaman sawit. Kalau soal integrasi kami belum tahu manfaat secara detailnya” (Wawancara dengan Saifullah, 3 Juni 2016).

Sapi yang diperlihara dalam kebun sawit adalah kebanyakannya milik pribadi masyarakat, sedangkan sapi bantuan dari pemerintah hanya satu ekor dilokasi yang dikelola oleh pak Dahlan dan Saifullah. Secara keseluruhan bantuan sapi dari pemerintah Aceh Timur ke Desa Alue Siwah Serdang pada tahun 2015 sebanyak 5 ekor untuk sepuluh orang anggota kelompok yang disalurkan oleh Dinas Peternakan Aceh Timur melalui Kelompok Bina Keluarga. Namun mereka memeliharanya secara terpisah yang dibagikan satu ekor untuk dua orang. Saifuddin menyatakan, “Kami memelihara sapi di dalam areal sawit secara bersama, kami bertiga memelihara 40 ekor sapi dalam tujuh hektar areal sawit, tetapi sapi bantuan pemerintah hanya 1 ekor berupa sapi Bali. Dengan model bersama ini kami bias bergantian untuk melepaskannya pada pagi hari Dan mencari kembali untuk dikandangkan pada sore hari” (wawancara dengan Saifuddin, Kades Alue Siwah Serdang, 3 Juni 2016).

Sementara informan lain juga memiliki kesamaan pendapat mengenai proses integrasi, tetapi sapi yang dipelihara dalam kebun sawit adalah bantuan dari Dinas Peternakan Aceh Timur tahun Anggaran 2009/2010. Namun jumlah yang mereka terima lebih banyak dari informan sebelumnya yaitu

sebanyak 10 ekor untuk satu kelompok yang berjumlah lima anggota. Jadi setiap anggota kelompok mendapat dua ekor sapi. Sapi bantuan tersebut adalah induk sapi betina jenis sapi Bali....”Kami mendapat 10 ekor sapi betina dari Dinas Peternakan Aceh Timur, dan saya memperoleh 2 ekor”. Ia menambahkan, “Sapi saya dari dua ekor selama enam tahun sudah menghasilkan anak sapi sebanyak 12 ekor melalui proses inseminasi buatan yang juga dilakukan pihak dinas peternakan. Akan tetapi sekarang sapinya hanya tersisa 6 (enam) ekor di kandang termasuk induk bantuannya, karena sebagiannya sudah dijual untuk keperluan ekonomi” (Wawancara dengan Sutimin, Ketua Kelompok Budi Daya Tani, Desa Alue Dondong 2, Kecamatan Rantau Panjang Perlak, 16 Juli 2016).

Keenam ekor sapi tersebut dilepaskan dalam 3 Hektar sawit. Sapi dilepaskan dari kandangnya pada sore hari sekitar pukul 3 dengan sistem angonan (*Peurabe Leumo*) dan dikandangan kembali pada pukul 05 wib. Tujuan dari angonan tersebut agar sapi mencari makan di lokasi yang diangonkan oleh pemiliknya saja dan tidak dapat pergi ke tempat lain. Dengan cara ini rumput untuk kebutuhan pakan sapi tetap terpenuhi secara terus menerus, karena sapi tidak akan berkeliaran kemana-mana secara bebas. Apabila sudah habis rumput di satu lokasi yang dingonkan, kemudian sapi dipindahkan ke lokasi lainnya.

Hal ini dilakukan secara bergilir setiap harinya. Dengan demikian, ketika waktu anongan sudah sampai pada giliran rumput pertama, rumputnya sudah tumbuh kembali dan siap untuk dimakan sapi. Namun pemeliharaan sapi model ini, setelah dikandangkan kembali pada pukul 5 sore sapi masih diberi pakan dan minum pada malam hari untuk mencukupi nutrisi dan mempercepat pertumbuhan dan penggemukan sapi. Menurut pengalamannya, mereka menyakini bahwa memberi pakan dan minum kepada sapi pada malam hari lebih baik dan cepat untuk pertumbuhan dan penggemukan.

Hal senada dengan penjelasan tersebut juga dinyatakan oleh informen lainnya, Budiman (anggota Kelompok Budi Daya Tani, Desa Alue Dondong 2, Kecamatan Rantau Panjang Perlak). Ia menyatakan bahwa:

“Sapi yang dipelihara dalam kebun sawit ini juga bantuan dari Dinas Peternakan Aceh Timur tahun anggaran 2009/2010 yang diberikan kepada anggota kelompok Budidaya Tani, dengan jumlah 10 ekor sapi untuk 5 anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok mendapatkan dua ekor sapi. Saya salah satu anggota kelompok Budidaya Tani. Sapi bantuan tersebut adalah induk sapi peranakan jenis Bali. Semua sapi dilepasan ke dalam 3 Hektar lokasi sawit. Waktu pelepasannya adalah pada pukul 3 sore dengan sistem anongan (*mengembala sapi*) juga dan dikandangkan kembali sekitar pukul 05 wib. Tujuannya agar sapi mencari makan di lokasi yang ditentukan oleh pemiliknya dan sapi tidak dapat pergi cari makan ke

tempat lainnya secara liar. Dengan demikian, kebutuhan rumput untuk pakan sapi tetap terpenuhi secara terus menerus, karena sapi tidak akan berkeliaran yang mengakibatkan pertumbuhan rumput terganggu. Namun cara ini, sapi masih diberikan pakan dan minum pada malam harinya, yaitu berupa rumput yang dicari oleh peternak ke areal lain, baik rumput liar maupun rumput gajah yang ditanami secara khusus (Wawancara, 17 Juli 2016).

Sementara pada lokasi sawit di kecamatan lainnya, Abdurrahman menjelaskan bahwa sapi yang dipelihara di dalam areal kebun sawit adalah milik peribadi bukan sapi bantuan, dengan jumlah 30 ekor. Sapi tersebut dimiliki oleh dua orang, yaitu 13 ekor adalah milik pak Abdurrahman dan 17 ekor milik temannya (Keuchik/Kepala Desa Kampungnya). Luas areal sawit untuk 30 sapi yang mereka pelihara adalah sekitar 13 hektar, yang terdiri dari areal sawit pak Abdurrahman seluas 3 Ha dan sawit pak Keuchik seluas 10 Ha.

Namun, meskipun pemiliknya dua orang, dan mereka memiliki areal sawit masing-masing, mereka memelihara secara bersama, di mana pelepasan sapi pada pagi hari dan pengurungan kembali pada malam harinya ke dalam satu lokasi yang telah dipagar dilakukan secara bersama, baik secara bersama-sama maupun dengan *shift system*. Pengurungan sapi pada malam hari ditempatkan pada areal sawit yang sudah dipagar seluas tiga hektar tanpa ada kandang, kecuali pada musim hujan dibuat tenda untuk tempat berteduh sapi pada

malam hari. Tujuan sapi dimasukkan dalam areal yang sudah dipagar adalah agar sapi tidak berkeliaran di jalan pada malam hari yang dapat mengganggu lalu lintas, sekaligus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurian.

Selanjutnya pada lokasi ini ditemukan bahwa sistem pemeliharaan sapi selain terdapat kerjasama antara dua pemilik sapi dan sawit, juga model integrasi sapi dengan sawit berbeda dari informen sebelumnya. Mereka memelihara sapi di dalam areal sawit dengan sistem bebas liar, seratus persen sapi mencari pakan sendiri secara bebas tanpa angonan, sehingga sapi dapat memakan gulma rumput maupun daun sawit tanpa terbatas. Pada malam hari pun sapi tidak lagi diberikan pakan, kecuali minum karena selama ditanami sawit anak sungai yang biasanya dialiri air sekarang sudah kering. Hanya pada musin hujan saja air terdapat di dalam anak sungai di sekitar areal sawit. Itu pun hanya untuk sementara waktu atau beberapa hari saja.

Mereka hanya mengandangkan sapi untuk proses penggemukan, yang diperkirakan pertumbuhannya sudah lambat, karena usia sapi sudah dewasa (sekitar 2 tahun). Dalam proses penggemukan biasanya sapi dikandangkan selama lima bulan hingga enam bulan saja, sebelum dijual kepada pembeli. Hal ini sering dilakukan dengan mempertimbangkan waktu jual yang tepat, yaitu biasanya diperkirakan sapi tersebut dapat dijual

menjelang hari-hari *meuang*⁶ di Aceh. Untuk mencapai target jumlah daging yang dihasilkan, penggemukannya dilakukan dengan menambah konsentrat pada pakan sapi. Penggemukan dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan masyarakat yang mau melakukan penggemukan sapi dengan sistem *mawah* (bagi hasil) dengan keuntungan dibagi sama, 50 : 50 (Wawancara dengan Abdurrahman, Desa Seuneubok Dalam, Kecamatan Nurussalam, 18 Juli 2016).

Proses integrasi sawit dan sapi yang dilakukan oleh pak Abdurrahman adalah juga proses integrasi yang alami, artinya beliau tidak ada pengetahuan yang khusus sebelumnya mengenai integrasi sawit dan sapi tersebut. Namun walaupun proses ini terjadi secara alami Pak Abdurrahman telah melakukan proses ini sejak tahun 2010. Sedangkan sebelumnya ketika beliau belum punya kebun sawit dan ia hanya memiliki 3 ekor sapi, pemeliharaannya dilakukan dengan memanfaatkan rumput yang ada di sekitar kebunnya, dan pada saat tidak musim tanam padi, sapinya dilepaskan ke areal persawahan.

⁶ Hari *Meuang* juga dikenal dengan istilah *Uroe Makmeuang* di Aceh. Hari *meuang* merupakan makin daging, tanpa mengenal kelas sosial. Dilaksanakan 1 atau 2 hari menjelang Hari Besar Islam, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan menjelang Puasa Ramadhan. Seluruh lapisan masyarakat Aceh, khususnya kepala keluarga (laki-laki) pada hari-hari tersebut berupaya sekuat tenaga untuk membahagiakan keluarganya dengan makan daging hewan. Jika tidak punya uang mereka tidak keberatan berhutang agar dapat memperoleh daging hewan (umumnya sapi) pada tersebut, karena hari-hari tersebut merupakan hari istimewa dan sakral bagi masyarakat Aceh. Akibatnya harga sapi menjelang hari meuang naik secara drastis.

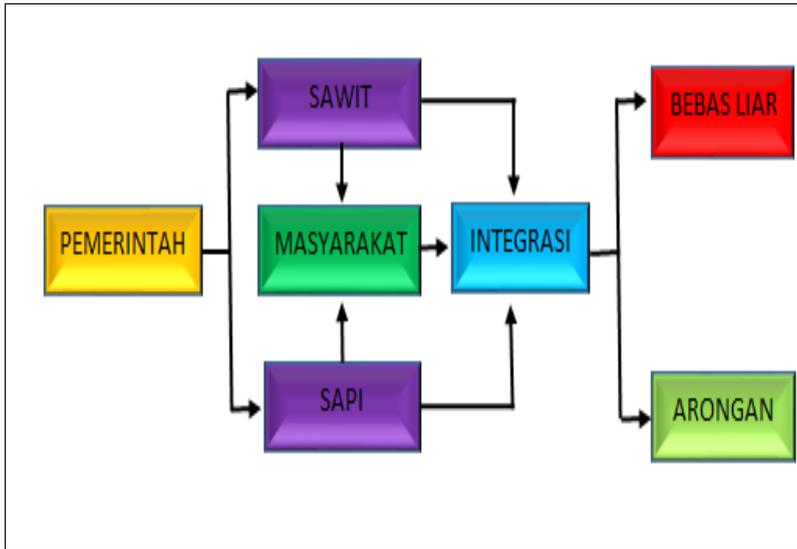
Setelah beliau punya kebun sawit timbul inisiatif untuk memanfaatkan kebun sawit tersebut untuk tempat pemeliharaan sapi. Sejak itu jumlah sapinya terus bertambah karena beliau menganggap dengan adanya lahan sawit sangat membantu dalam memelihara sapi, karena waktu yang dihabiskan untuk sapi singkat, tidak seperti sebelumnya yang memerlukan waktu lama untuk mencari sapi pada sore hari untuk dikandangan, karena sapi bebas berkeliaran tanpa batas areal merumput. Namun setelah ada kebun sawit sapi hanya mencari makan atau merumput di sekitar kebun sawit (Wawancara dengan Abdurrahman, Desa Seuneubok Dalam, Kecamatan Nurussalam, 18 Juli 2016).

Huraian di atas menggambarkan bahwa integrasi sawit dan sapi yang dilakukan oleh masyarakat petani terjadi secara alami tanpa pengetahuan dan teknologi modern, dan pilihan tersebut atas dasar keterpaksaan karena telah berkurangnya lahan bebas penggembalaan sapi akibat sudah banyak ditanami sawit, sehingga pemanfaatan pelepak dan daun sawit untuk pakan sapi tidak diolah dengan teknologi. Sapi hanya memakan rumput atau gulma yang tumbuh liar di areal sawit serta daun sawit yang memungkinkan untuk dikunyah seperti daun sawit di pohonnya.

Bahkan petani lebih memilih untuk mencari gulma rumput di areal lainnya untuk pakan sapi malam hari atau menanam rumput gajah pada areal khusus yang dipotong pada sore hari untuk pakan sapi, ketimbang memanfaatkan pelepak sawit dan

daunnya yang harus diolah terlebih dahulu dengan teknologi. Secara skematik proses pembentukan integrasi tersebut dapat diejlaskan sebagai berikut:

Gambar 5. 1: Proses Pembentukan Integrasi Sawit Sapi



Integrasi model tersebut berbeda dengan integrasi sapi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang dapat dikategorikan kepada tiga model, yaitu intensif, ekstensif dan transportatif, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro (2014) bahwa tujuan perusahaan melakukan program integrasi sapi-sawit adalah; (1) untuk mendapatkan pupuk organik, pemeliharaan sapi dilakukan secara intensif di kandang.

Sebagai contoh, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Bukit Sentang, Medan; (2) Sapi difungsikan untuk pemakan gulma/rumput yang tumbuh di kebun sawit dan diberi tambahan

pakan penguat/konsentrat dan air minum. Integrasi sapi-sawit dilakukan secara ekstensif, contoh di PT. Sulung Ranch Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah; dan (3) integrasi dengan tujuan memanfaatkan tenaga kerja sapi untuk pengangkut sawit karena terjadi kekurangan tenaga kerja di lingkungan kebun sawit. Sebagaimana yang dilakukan PT Agrical di Bengkulu Utara.

Selain itu, model integrasi yang dilakukan oleh masyarakat petani sawit di Aceh Timur adalah dengan menjalin kerjasama antar petani sawit, dan antara peternak dengan petani sawit. Kerjasama antar petani sawit terjadi di lokasi yang melakukan integrasi sapi ke dalam sawit secara bebas tanpa angonan, sementara masyarakat yang memelihara sapi secara angonan di dalam areal sawit, mereka tidak menjalin kerjasama. Ini umumnya terjadi pada masyarakat petani yang bersuku bangsa Jawa yang hanya memelihara sapi jenis Bali dan Brahmna.

Adapun kerjasama antara petani sawit yang tidak memiliki ternak dan peternak tidak yang memiliki areal sawit terjadi pada kalangan masyarakat yang bersuku bangsa Aceh. Ini berlangsung karena saling menguntungkan kedua belah pihak. Model integrasi seperti ini dapat menguntungkan karena bagi pemilik sapi tidak perlu memikirkan tempat untuk melepaskan sapi mereka, sedangkan bagi pemilik sawit tidak perlu memikirkan untuk membersihkan rumput di dalam kebun sawitnya, sehingga program integrasi ini memang sangat menguntungkan. Dalam hal ini Jufri selaku peternak sapi menyatakan:

Saya melepaskan sepuluh sapi dalam kebun sawit orang lain. Petani sawit diuntungkan tidak perlu membersihkan sawitnya lagi, selain dimakan oleh sapi, rumput yang ada dalam kebun sawit juga saya bersihkan sambil menjaga sapi. Dan saya diuntungkan tidak perlu mencari pakan ternak ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal saya. Kecuali untuk mencukupi kebutuhan makan sapi pada malam hari saya harus mencari rumput dari tempat lain. Setiap harinya membutuhkan tiga karung rumput untuk dimakan oleh sepuluh sapi (Hasil wawancara dengan Jufri Alias Jabrik, Peternak Sapi, Desa ALue Siwah serdang, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, 3 Juni 2016)

Namun demikian, integrasi sapi dan sawit belum dilakukan oleh pemerintah secara khusus, karena bagian peternakan dan perkebunan masih bekerja secara terpisah dan kurang koordisasi. Akibatnya bantuan bidang peternakan tidak dapat diintegrasikan dengan bantuan sawit melalui dinas perkebunan. Kecuali jika secara kebetulan bantuan peternakan diperoleh oleh petani sawit. Hal ini dipertegasakan oleh petani sawit di Alue Siwah dimana mereka memperoleh bantuan sapi lima ekor untuk sepuluh orang. Sebagian mereka memeliharanya di areal sawit, tetapi sebagian lainnya tidak demikian (Wawancara dengan Pak Basaruddin, Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, 4 Juni 2016).

Kenyataan ini mungkin merupakan salah satu faktor yang telah menyebabkan terjadi ambivalensi antara peningkatan peternak sapi dan pengembangan sapi. Jumlah peternak sapi terus

meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2012 terdapat 38 kelompok, dan 2013 adalah 49 kelompok. Bahkan pada tahun 2014 meningkat tajam, yaitu mencapai 100 kelompok dengan produksi daging sapi mencapai 361.232 kg. Namun populasi sapi mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 70.874 ekor, pada tahun 2013 45.030 ekor dan pada tahun 2014 51.428 ekor (BPS Aceh Timur, 2015).

Walaupun demikian, menurut Penyuluh Pertanian Aceh, Nani Yulizar (2016) Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan sapi potong di provinsi Aceh. Kini Aceh Timur tercatat sebagai daerah kedua yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sapi potong setelah Aceh Besar, dengan perbandingan, saat ini Aceh Timur memiliki sapi sebanyak 51.428 ekor dan Aceh Besar sebanyak 56.000 ekor. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sapi adalah sistem budidayanya yang masih bersifat semi intensif dengan teknologi sederhana, sehingga pemberian pakan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi ternak.

5.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Integrasi Sawit dan Sapi dalam Pemberdayaan Ekonomi.

Walaupun proses integrasi sapi dengan sawit dilakukan oleh masyarakat secara alami menurut pengetahuan dan pengalaman masing-masing, tanpa pembinaan dan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari pihak ketiga, seperti akademisi dan pemerintah. Masyarakat petani umumnya

berpersepsi positif terhadap integrasi yang dijalankan. Mereka masih memperoleh banyak manfaat dari proses integrasi tersebut walaupun terdapat dampak negatif yang dinilai oleh mereka sangat sedikit.

Menurut mereka dengan model integrasi yang dijalankan manfaat yang diperoleh diantaranya; (1) sawit bersih dengan sendiri, tidak perlu lagi melakukan penyemprotan gulma dengan pestisida; (2) kotoran sapi dapat dijadikan pupuk untuk tanaman sawit. Akan tetapi perkembangan sawit sangat lambat jika pupuknya dari kotoran sapi, pupuk kimia lebih baik bagi percepatan perkembangan sawit. Oleh karena itu walaupun ada pupuk dari kotoran sapi kami tetap pakai pupuk kimia supaya sawitnya cepat berbuah; (3) secara ekonomi dapat meningkatkan penambahan penghasilan, misalnya sapi yang dibeli dengan harga lima juta rupiah, dalam waktu tiga bulan kemudian dapat dijual dengan harga delapan juta rupiah; (4) petani memiliki waktu lebih banyak yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya, baik kegiatan ekonomi produktif maupun kegiatan sosial, karena dengan model integrasi hanya memerlukan waktu 2 jam sehari untuk mengurus sapi.

Berikut ini adalah sebagian penjelasan dari informen. Saifuddin menyatakan: Manfaat secara sederhana yang kami ketahui adalah sawit bersih dan kotorannya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman sawit. Akan tetapi perkembangannya sangat lambat jika pupuk sawit dari kotoran sapi, lebih baik pupuk kimia karena

perkembangan sawit lebih cepat. Oleh karena itu walaupun ada pupuk dari kotoran sapi kami tetap pakai pupuk kimia supaya sawitnya cepat berbuah. Manfaat integrasi ini secara ekonomi adalah dapat meningkatkan penambahan penghasilan, sapi yang dibeli dengan harga 5 juta misalnya, dalam waktu tiga bulan kemudian bisa dijual dengan harga delapan juta rupiah. Selain itu, integrasi ini kami memiliki waktu lebih banyak yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya baik kegiatan ekonomi produktif maupun kegiatan sosial, karena dengan model integrasi seperti ini hanya butuh waktu 2 jam sehari untuk mengurus sapi, selebihnya dapat digunakan untuk pekerjaan lain, seperti menanam cabe, menanam jahe dan tanaman muda lainnya. Selain itu jika ada acara kematian, undangan pesta serta kegiatan sosial masyarakat dan silaturahmi lainnya kami tidak risau lagi untuk meninggalkan peliharaan sapi (wawancara dengan Saifuddin, masyarakat Alue Siwah Serdang, 3 Juni 2016).

Selanjutnya informan lain (Jufri) menjelaskan proses integrasi yang dilakukannya sangat bermanfaat bagi petani dan peternak serta masyarakat lain di sekitarnya. Ia menyatakan pemeliharaan sapi dalam sawit akan membantu menjaga kebersihan kebun sawit. Apalagi seperti dirinya yang melepaskan sapi ke dalam kebun orang lain, sambil ia menjaga sapi di kebun tersebut beliau juga membersihkan sawit sebagai bentuk terima kasihnya (balas jasa) karena jika pemilik kebun menyemprot rumput, sapi yang dipeliharanya akan kekurangan pakan. Selain itu kotoran sapi yang terkumpulkan di kandang

sapinya diambil oleh masyarakat sekitar untuk digunakan sebagai pupuk pada tanaman. Menurutnya 10 ekor sapi dapat menghasilkan kotoran sekitar 1.5 ton dalam jangka waktu 7 bulan (Wawancara di Alue Siwah Serdang, 3 Juni 2016).

Informan tersebut (Saifuddin) juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa mereka sebagai pengurus desa banyak kegiatan sosial yang bisa dilaksanakan dengan model integrasi yang dilaksanakan, karena banyak sisa waktu akibat dari integrasi sawit dan sapi ini. Manfaat lainnya yang dirasakan adalah terjaganya waktu shalat terutama shalat Ashar dan Magrib. Hal ini karena sebelum integrasi kami harus mencari pakan dan sapi untuk dikandangan sejak pukul 3.00 sore sampai magrib, bahkan kadang-kadang pada saat magrib pun kami belum sampai ke rumah. Namun demikian, menurutnya juga ada dampak negatif dari integrasi yang dilakukannya. Ia menyatakan:

“.....yang kami ketahui sawit memerlukan banyak makanan (konsumsi air), sehingga tidak boleh bercampur dengan tanaman lain, karena sawitnya tidak mau berbuah atau sebaliknya. Selain itu kalau sudah ada sapi di dalam kebun sawit, dampak negatifnya adalah tidak memungkinkan lagi kita tanam tanaman muda karena akan dimakan oleh sapi (wawancara di Alue Siwah serdang, 3 Juni 2016).

Sedangkan menurut Sutimin (Ketua Kelompok Budi Daya Tani) integrasi sawit dan sapi sangat baik, misalnya dengan sapi dikandangan di areal sawit dapat dimanfaatkan kotorannya sebagai pupuk sawit. Enam ekor sapi

diperkirakan dapat menghasilkan 1 ton kotoran dalam waktu setengah bulan. Kotoran sapi difrekmentasikan dan dijadikan pupuk sawit, sehingga dapat menghemat 50% penggunaan pupuk kimia. Menurutnya model ini sangat baik untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak pernah mengalami dampak negatif terhadap sawit akibat dari program semacam ini (Wawancara di Desa Alue Dondong 2, Kecamatan Rantau Panjang Perlak, 16 Juli 2016).

Hal senada juga dinyatakan oleh Budiman (Anggota Kelompok Buda Daya Tani) bahwa dengan adanya integrasi sawit dan sapi banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh petani secara bersinergi. Misalnya sapi yang dilepas dalam kebun sawit dapat memberi manfaat kebun sawit menjadi bersih. Kemudian menurutnya daun dari pelepah sawit juga dapat dimanfaatkan untuk pakan sapi.

Hal ini sudah pernah dicoba olah olehnya, walaupun ia menilai sekam padi lebih mudah dan baik untuk pakan ternak. Ini factor utamanya adalah pemanfaatan pelepah sawit untuk pakan ternak masih sulit dilakukan karena membutuhkan mesin yang lebih komplek untuk dapat menghaluskan duri dan lidi yang ada pada pelepah daun sawit. Informan telah mencoba mendesain mesin pencacahnya sendiri, namun hasilnya belum maksimal. Sehingga sampai sekarang pelepah daun sawit belum bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak sapinya secara maksimal, tetapi kotorannya tetap bisa dimanfaatkan untuk pupuk sawit.

Sementara untuk pakan sapi ia lebih memilih ampas tahu kedelai (Wawancara di Desa Alue Dondong 2, Kecamatan Rantau Panjang Perlak, 17 Juli 2016).

Namun demikian, menurut Budiman program integrasi sawit dan sapi ini juga memiliki dampak negatif yaitu sapi yang dilepas di dalam areal sawit akan memakan daun sawit. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat produksi sawit karena daun sawit rusak. Akan tetapi dampak negatif tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan sawit, karena tingkat kerusakannya tidak begitu signifikan atau sangat kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh dari ternak sapi (Wawancara di Desa Alue Dondong 2, Kecamatan Rantau Panjang Perlak, 17 Juli 2016).

Selanjutnya lebih jauh lagi manfaat integrasi ini dijelaskan oleh petani lain, Abdurrahman. Menurutnya manfaat yang diterima dari integrasi sawit dan sapi ini adalah sangat terbantu secara ekonomi, terutama untuk pendidikan anaknya, karena apabila ia perlu uang untuk keperluan kuliah anak, ia tidak terlalu pusing memikirkan uangnya dari mana. Dengan sejumlah sapi yang dipeliharanya di dalam areal sawit, ia hanya memilih mana yang sudah layak untuk dijual dengan mempertimbangkan seberapa banyak uang yang diperlukan. Selain itu dengan adanya program integrasi ini sawit jadi bersih, karena tidak perlu lagi potong rumput di bawah pohon sawit atau disemprot, karena sudah dimakan oleh sapi,

oleh karena itu dengan sendirinya mengurangi biaya operasional pemeliharaan sawit. Serta banyak sisa waktu untuk melakukan kegiatan yang lain seperti menanam jahe, kunyit dan jagung.

Oleh karena itu menurut Abdurrahman bahwa sistem integrasi sapi dan sawit sangat menguntungkan petani, terutama terhadap peningkatan penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Model ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia mengharapkan model ini dapat dijadikan sebagai model pemberdayaan petani oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat di wilayahan perkebunan. (Wawancara di Desa Seuneubok Dalam, Kecamatan Nurussalam, 18 Juli 2016).

5.3 Dampak Integrasi Sawit dan Sapi Terhadap Pendapatan Masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sekilas dalam bagian persepsi masyarakat, bahwa peningkatan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat dari integrasi sawit dan sapi jelas ada, tetapi bagi petani yang sawitnya masih kecil keuntungan ekonomi kurang dirasakan, karena pendapatan mereka dari sawit masih minim. Hal ini dapat dipahami dari pendapat informen, "...Cuma saja karena ini sawitnya masih kecil sehingga belum begitu nampak secara signifikan peningkatan ekonominya".

Padahal hitungan sederhana mereka jelas memperlihatkan keuntungannya dari sapi, menurut mereka sapi yang dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- misalnya, dalam waktu enam bulan sapi tersebut bisa dijual dengan harga Rp. 11.000.000,-. Ini artinya ada keuntungan perbulan Rp. 1.000.000,- perekor. Bayangkan jika dalam satu lokasi ada 40 ekor yang dipelihara, maka penghasilan secara keseluruhan dalam satu lokasi Rp 240.000.000,- dibagi 6 kelompok, maka perkelompok penghasilannya mencapai Rp. 40.000.000,-, jika perkelompok berjumlah empat orang maka perorang dapat keuntungan Rp.10.000.000,- jadi perbulan petani tersebut mempunyai keuntungan dari sapi Rp.1.666.666,-. Selain itu, masyarakat juga dapat melaksanakan pekerjaan lain, seperti menanam cabe dan jahe. Kedua komoditi ini juga akan menambah penghasilan untuk petani tersebut. Jadi memang program integrasi sawit dan sapi ini sangat baik dilaksanakan karena memang sangat menguntungkan masyarakat tani baik secara ekonomi, sosial dan dari segi efisiensi waktu (wawancara dengan Saifuddin, Kades Alue Siwah Serdang, 3 Juni 2016).

Selanjutnya menurut Sutimin bahwa pendapatan dari sawit dan sapi perbulan/hektar adalah Rp. 3.600.000,- jika sapi dikandangkan dan diberi pakan pada malam hari (*dilakukan*

secara intensif ataupun semi intensef)⁷ (Wawancara dengan Sutimin, Ketua Kelompok Budi Daya Tani, Desa Alue Dondong 2, Kecamatan Rantau Panjang Perlak, 16 Juli 2016). Namun hal tersebut berbeda jika sapi dilepas bebas dalam sawit tanpa pakan pada malam hari, dengan jenis sapi adalah sapi kampung (sapi Aceh atau kacang). Pendapatan petani dari integrasi sawit dan sapi perbulan/hektar/sapi hanya mencapai Rp. 2.600.000 (Wawancara dengan Abdurrahman, Desa Seuneubok dalam, Kecamatan Nurussalam, 18 Juli 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dengan adanya program integrasi sawit dan sapi yang dikandangkan terjadi peningkatan pendapat petani mencapai 80%. Sedangkan pada sistem lepas liar peningkatan pendapatan dari sapi hanya 62%. Hal ini dikarenakan pada sistem pengkandangan kotoran sapi dapat terkumpul, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pupuk bagi tanaman sawit, dan sekaligus menghemat biaya untuk pembelian pupuk kimia.

Sedangkan pada sistem lepas liar manfaat positifnya hanya pada kebersihan kebun sawit akibat pengurangan tumbuhnya rumput liar di areal kebun sawit karena dimakan oleh sapi. Hal tersebut sekaligus menggambarkan perbedaan dampak positif dari sistem pengkandangan dengan sistem yang

⁷ Yang dimiringkan adalah tambahan dari penulis dengan meminjam dan menganalogiskan kepada konsep yang disampaikan oleh Syukur Iwantoro (2014) di bagian sebelumnya.

dilepaskan secara liar di dalam areal kebun sawit. Pendapatan yang diperoleh oleh petani yang melakukan sistem integrasi dengan sistem pengkandangan lebih besar dibandingkan dengan sistem lepas liar, baik penghasilan dari kelapa sawit maupun penghasilan dari sapinya.

Sementara hitungan pendapatan petani sawit tanpa sapi yang mencapai Rp 1.666.666,- hampir sama dengan hasil penelitian Saifuddin dkk (2015), yang menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan mantan kombatan GAM dan korban konflik dari usaha perkebunan sawit program bantuan pemerintah rata-rata sebesar Rp. 1.755.547,- perbulan. Tingkat pendapatan tersebut diperoleh dari produksi kelapa sawit yang baru berumur 4-5 tahun. Perbedaan pendapatan petani sawit seperti yang digambarkan di atas sangat tergantung pada perkiraan harga sawit ketika penelitian dilaksanakan. Selain itu Saifuddin, dkk (2015) juga menyebutkan bahwa dari peternakan diperkirakan dapat memperoleh keuntungan dalam masa 6 bulan pemeliharaan mencapai 5 juta jika dirawat dengan makanan yang cukup. Namun tidak semua petani memiliki peliharaan ternak sendiri.

Sebagian mereka memelihara ternak orang yang keuntungannya harus dibagi dua. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika merujuk kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh para pakar (Harris, 2003), yaitu mencakup tiga aspek pembangunan, ekonomi, sosial dan lingkungan, dapat dikatakan bahwa sistem integrasi sawit dan sapi yang

dilaksanakan oleh masyarakat petani sawit di Aceh walaupun mereka tidak paham dengan pembangunan berkelanjutan, mereka telah mempraktikkan integrasi tersebut dalam kerangka konsep pembangunan berkelanjutan.

Model integrasi yang dijalankan ternyata bukan saja meningkatkan ekonomi mereka, tetapi juga telah terjadi pembangunan sosial, karena terjalin kerjasama sama antar pemilik kebun, dan antara pemilik sapi dan pemilik kebun. Bahkan integrasi tersebut telah berdampak positif terhadap peningkatan intensitas aktifitas sosial masyarakat petani. Lebih jauh lagi malahan aktifitas ibadah mereka pun dapat ditunaikan. Sementara aspek lingkungan adalah pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak unsur tanah, yang pada akhirnya menyebabkan kualitas kesuburan tanah dan air bersih.

Kenyataan tersebut juga dapat dikatakan bahwa program bantuan sawit dan sapi dari pemerintah, yang kemudian dalam pelaksanaannya diintegrasikan oleh masyarakat petani sangat potensial untuk pembangunan perdamaian seperti yang dikembangkan oleh UNDP (1994) melalui konsep *human security* dan UNEP (2009) yang menyatakan bahwa sumber daya alam (lingkungan) dapat memberi kontribusi kepada pembangunan perdamaian melalui pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. Sementara kerjasama dalam mengelolanya adalah peluang untuk pembangunan perdamaian.

5.4 Dampak Sosial dari Model Integrasi Sawit dan Sapi

Pelaksanaan model integrasi sawit dan sapi dalam pemberdayaan masyarakat memiliki dampak sosial baik secara positif dan negatif. Salah satu dampak positif yang langsung dirasakan oleh petani dengan pelaksanaan model ini adalah memiliki banyak waktu luang untuk melakukan aktifitas lain seperti, berinteraksi sosial dengan masyarakat baik di warung kopi maupun dalam aktifitas sosial lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Aceh berintraksi dengan teman dan kolega sambil menikmati segelas kopi di warung merupakan satu budaya yang sampai hari ini masih kental di Aceh. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Pola integrasi sawit dan sapi sangat sesuai dengan budaya hidup orang Aceh. Apabila sawitnya sudah besar, dan sapi sudah bisa di le[as di kebun sawit, pemiliknya bisa nongkrong diwarung kopi, lima belas hari sekali panen sawit sudah menanti. Untuk pakanpun petani tidak susah karena bisa diambil dari rumput dalam kebun atau pelepah sawit, oleh karena itu tanaman sawit memang sangatlah sesuai diapdukan dengan sapi serta sangat sesuai pula dengan budaya hidup orang Aceh. (wawancara dengan Khairullah, Kabid Perkebunan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Aceh Timur, 5 Juli 2017).

Secara umum tidak terjadi dampak sosial yang negatif dari program integrasi sawit dan sapi tersebut, kalau tanaman

masyarakat dimakan oleh sapi ketika dibawa ke areal sawit akan diselesaikan sesuai dengan Qanun Gampong atau dilakukan ganti rugi, namun sebagian masyarakat petani yang merasa rugi akibat tanamannya dimakan sapi dapat melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian. Jika penyelesaian di Gampong dirasakan tidak adil (Wawancara dengan Basaruddin, petugas lapangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, 6 Juli 2017)

Dampak negatif dari penggiringan sapi dari kandang ke areal sawit seperti terganggunya transportasi oleh kawan-kawanan lembu atau kotoran lembu berserak di jalanan tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemilik sapi (Wawancara dengan Basaruddin, petugas lapangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, 6 Juli 2017)

Konflik sosial pernah muncul ketika pembagian bantuan sawit dan sapi diperoleh oleh orang yang sama, namun ini dapat diselesaikan dengan memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa sapi bukan milik individu maupun kelompok tetapi milik masyarakat yang akan dapat dimanfaatkan secara bergulir melalui proses reproduksi atau pengembangbiakan (Wawancara dengan Basaruddin, petugas lapangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, 6 Juli 2017)

Selain itu pengelolaan sapi bantuan juga dikelola melalui mawah dengan sistem bagi hasil 50 : 50. Dengan cara seperti ini pengelola sapi bantuan lebih bertanggung jawab karena hasil dari proses pengelolaan tersebut akan didapatkan setengah. Pemerintah berharap tidak ada dampak sosial yang negatif di kalangan masyarakat (wawancara dengan Khairullah, Kabid perkebunan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Aceh Timur, 5 Juli 2017).

Untuk menghindari dampak sosial yang negatif pemerintah mulai tahun 2015 telah mensyaratkan kepada setiap kelompok penerima bantuan untuk mendapat pengesahan dari badan penyuluh di wilayah masing-masing. Selain itu pada saat survey calon penerima bantuan pemerintah mensyaratkan harus dihadirkan ketua dan anggota kelompok minimal 2/3 (dua pertiga). Kemudian pada saat bantuan diberikan ketua dan anggota kelompok harus dihadirkan supaya semuanya tahu ada bantuan dari pemerintah, sehingga nanti tidak ada anggota kelompok yang merasa tidak dilibatkan, tidak tahu yang kemudian berakhir pada konflik sosial di masyarakat (wawancara dengan M. Mahdi, Kabid Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Aceh Timur, 5 Juli 2017).

Namun menurut Kahirullah ada mekanisme pembentukan kelompok yang lebih efektif untuk mengawasi keberhasilan kelompok dan mengurangi kecemburuan sosial

antara masyarakat yaitu setiap desa dibentuk satu kelompok saja sebagai kelompok inti di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian setiap kelompok usaha mendapat pengawasan dari kelompok inti.

Khususnya dibidang peternakan menurut pak Mahdi mekanisme pembentukan kelompok selain mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas juga dibentuk kelompok inti dan kelompok plasma untuk menjamin keberlanjutan bergulirnya bantuan sapi yang telah diberikan kepada masyarakat desa tertentu. Dalam hal ini kelompok inti sebagai penerima bantuan pertama yang akan mereproduksi sapi akan mendapat pengawasan dari kelompok plasma yang akan menerima bantuan bergulir dari kelompok inti.

BAB VI

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU

6.1 Sinergisitas antar Satuan Kerja Pemerintah dan Pihak Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan model integrasi sawit dan sapi dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur dilakukan dengan dua cara. Pertama dilakukan atas inisiatif petani sendiri. Kedua dilakukan atas bantuan pemerintah, artinya ada pemilik sawit yang mendapat sapi dari pemerintah. Dalam pembagian sapi kepada masyarakat tidak ada koordinasi secara resmi antara Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan, karena masing-masing dinas punya kewenangan tersendiri. Sampai akhir tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdiri

sendiri dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri. Namun sejak tahun 2017 khusus masalah kehutanan langsung berada di bawah kendali Dinas Provinsi Provisnis sedangkan Dinas Perkebunan dan Peternakan digabung menjadi satu Dinas. Oleh karena dalam perencanaan program integrasi akan semakin mudah. (Wawancara dengan Basaruddin, petugas lapangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, 6 Juli 2017)

Untuk tahun anggaran 2018 integrasi sawit dan sapi telah direncanakan oleh pemerintah dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pengembagan dari integrasi coklat dan kambing yang telah dilakukan dari tahun-tahun seblumnya (wawancara dengan Khairullah, Kabid perkebunan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Aceh Timur, 5 Juli 2017).

Pada sisi lain koordinasi pihak swasta dengan pemerintah seperti pengusaha baik produsen minyak sawit dalam bentuk CPO (*crude palm oil*) maupun pengumpul tidak terjadi sinergitas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat karena pengusaha bebas menentukan harga baik harga sawit, maupun harga pupuk kecuali pupuk subsidi. Diluar material subsidi, pengusaha bebas menjalin kerja sama dengan masyarakat tanpa dapat diintervensi dengan pihak pemerintah.

Jika pun harga komoditi sawit dan sapi tekeh ditetapkan harganya namun jika pengusaha melanggar ketetapan tersebut, pemerintah terutama pemerintah tingkat dua tidak dapat mengambil satu tindakan (Wawancara dengan Basaruddin, petugas lapangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, 6 Juli 2017)

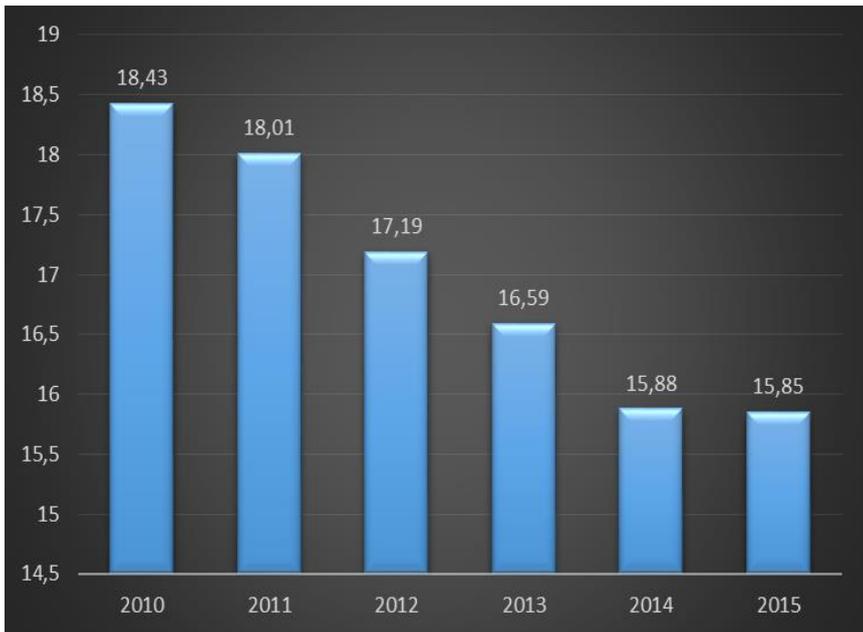
Hal ini disebabkan sistem ekonomi kita menganut sistem kapitalis yang mengedepankan kebebasan pasar dan persaingan. Selain itu intervensi terhadap harga bukan menjadi wewenang pemerintah Kabupaten. Salah satu strategi untuk menguatkan posisi petani dalam menentukan harga adalah pengadaan infrastruktur jalan yang bagus sehingga akses masyarakat petani kepada pengusaha atau pengumpul dapat dilakukan dengan mudah dan masyarakat punya pilihan untuk menjualkan komoditasnya kepada pengusaha - pengusaha yang mampu membeli dengan harga yang lebih baik. Dengan demikian tidak terjadi monopoli pembelian komoditas oleh satu perusahaan atau pengumpul komoditas sawit di areal perkampungan sawit (Wawancara dengan Basaruddin, petugas lapangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, 6 Juli 2017)

6.2 Model Integrasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Masyarakat tani di desa-desa dalam Kabupaten Aceh Timur telah merasakan kehadiran pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang telah memberikan bantuan sawit kepada masyarakat yang memiliki lahan pada tahun 2014 telah mencapai 3.726 Ha. Bantuan ini diberikan secara berkelompok sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Tidak hanya bibit sawit yang diberikan, pemerintah juga menyediakan jasa pembersihan lahan, jasa penanaman, pupuk hingga alat dodos dan kereta sorong (grek angkut).

Dalam lima tahun terakhir pemerintah juga memberikan bantuan sapi kepada sejumlah kelompok masyarakat melalui dinas Peternakan dengan harapan perekonomian masyarakat akan semakin baik sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan menurun. Namun pertanyaan kemudian setelah masyarakat memiliki kebun sawit dan memiliki sapi bantuan pemerintah apakah masyarakat sudah sejahtera? Untuk menjawab soal tersebut kita harus melihat data tingkat kemiskinan di Aceh Timur dalam lima tahun terakhir, sebagaimana yang digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 6.1 : Tingkat Kemiskinan di Aceh Timur 2010 - 2015



Sumber: Aceh Timur Dalam Angka, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir tingkat kemiskinan di Aceh Timur mengalami penurunan yaitu dari 18,43% pada tahun 2010 turun ke angka 15,85% pada tahun 2015. Walaupun turunnya angka kemiskinan bukan disebabkan oleh faktor bantuan pemerintah kepada masyarakat semata, namun setidaknya perhatian pemerintah tersebut telah menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena tidak

terlalu berlebihan rasanya kalau hari kita mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah lebih baik.

Dalam istilah umum, sejahtera merujuk kepada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Jika istilah umum kesejahteraan ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat petani saawit di Aceh Timur, maka keadaan makmur itu sampai hari ini belum bisa didapatkan. Namun setidaknya dengan adanya bantuan dari pemerintah kebutuhan dasar masyarakat dapat teratasi dari panen sawit dan sapi tersebut.

Hal yang paling sering dialami petani setiap kali panen adalah harga jual yang rendah. Oleh karena petani sangat mengharapkan agar pemerintah dapat membuat sebuah regulasi yang berpihak kepada petani, supaya harga jual buah sawit tidak terlalu rendah bahkan ada kesan dipermainkan oleh pihak swasta. Kalau harga sawit dapat dijaga dengan stabil masyarakat tani akan mendapat label sejahtera dalam pengertian umum di atas. Jika pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terutama dalam mengontrol harga sawit, maka sampai kapanpun petani sawit di daerah ini tidak akan terberdaya apalagi berada pada level sejahtera.

Hari ini kita sangat miris melihat kondisi petani yang berada di desa –desa di pedalaman Aceh Timur, mereka tidak punya akses terhadap harga pasar, oleh karena itu

sangat mudah bagi pembeli pengumpul untuk menetapkan harga sesuka hati mereka yang jauh dari harga pasar. Jika kondisi ini terus menerus terjadi maka sampai kapan pun petani disana tidak berdaya. Kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh masyarakat di Aceh Timur, namun sejumlah petani diberbagai kabupaten di Aceh juga mengalami hal yang sama. Hal ini sebagaimana dimuat dalam harian serambi yang menyatakan;

Kasus anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani di kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, Kabupaten Abdy sepekan terakhir diduga adanya indikasi permainan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan memanfaatkan banjirnya TBS pasca lebaran. Penilaian ini diungkapkan beberapa petani termasuk pedagang pengumpul. Petani menduga turun drastis harga TBS sawit belakangan ini diduga karena spekulasi pengusaha PKS dengan memanfaatkan banjir TBS sawit setelah lebaran idul fitri. Harga ditingkat pedagang pengumpul Rp. 850 per kg, padahal sepekan sebelum lebaran harga jualnya Rp. 1.200 – Rp. 1.250 per kg. Bila harga TBS sawit ditingkat petani di bawah Rp.1.000 per kg akan merugikan petani karena harus mengeluarkan ongkos produksi serta biaya perawatan kebun (Serambi Indonesia, 10 Juli 2017).

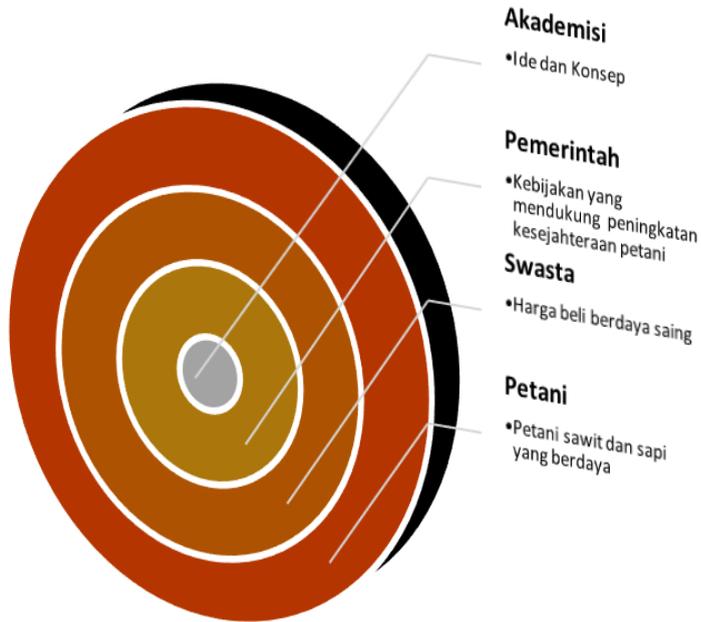
Data di atas jelas menunjukkan bahwa bukan hanya di pantai timur harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang mengalami anjlok, namun di pantai barat selatan juga mengalami hal yang sama. Di harian yang sama (serambi

Indonesia) di pantai barat selatan ada yang dibeli ditingkat pengumpul Rp. 600 – Rp. 700 per kg. Petani akan merugikan jika harga jual sawitnya ditingkat pengumpul di bawah Rp. 1000 per kg, karena petani harus mengeluarkan ongkos produksi serta biaya perawatan kebun.

Pengusaha Perkebunan Kelapa sawit Syahrul Miswar meminta Pemerintah Aceh segera menerapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 14/permentan/OT.140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permainan harga di tingkat pabrik, sebab pemerintah daerah punya kewenangan untuk menentukan harga TBS sesuai permentan tersebut. Selama ini petani perkebunan kelapa sawit sangat mengeluh dengan harga TBS yang turun drastis khususnya di pantai barat selatan (Serambi Indonesia, 10 Juli 2017).

Oleh karena itu, melihat pelaksanaan model integrasi sawi dan sapi dalam pemberdayaan petani masih mengalami berbagai kendala, maka pemerintah, swasta dan akademisi sama-sama harus mendukung untuk kesejahteraan petani sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Peran masing-masing pihak dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 6.1: Peran Para Pihak Dalam Pemberdayaan Masyarakat

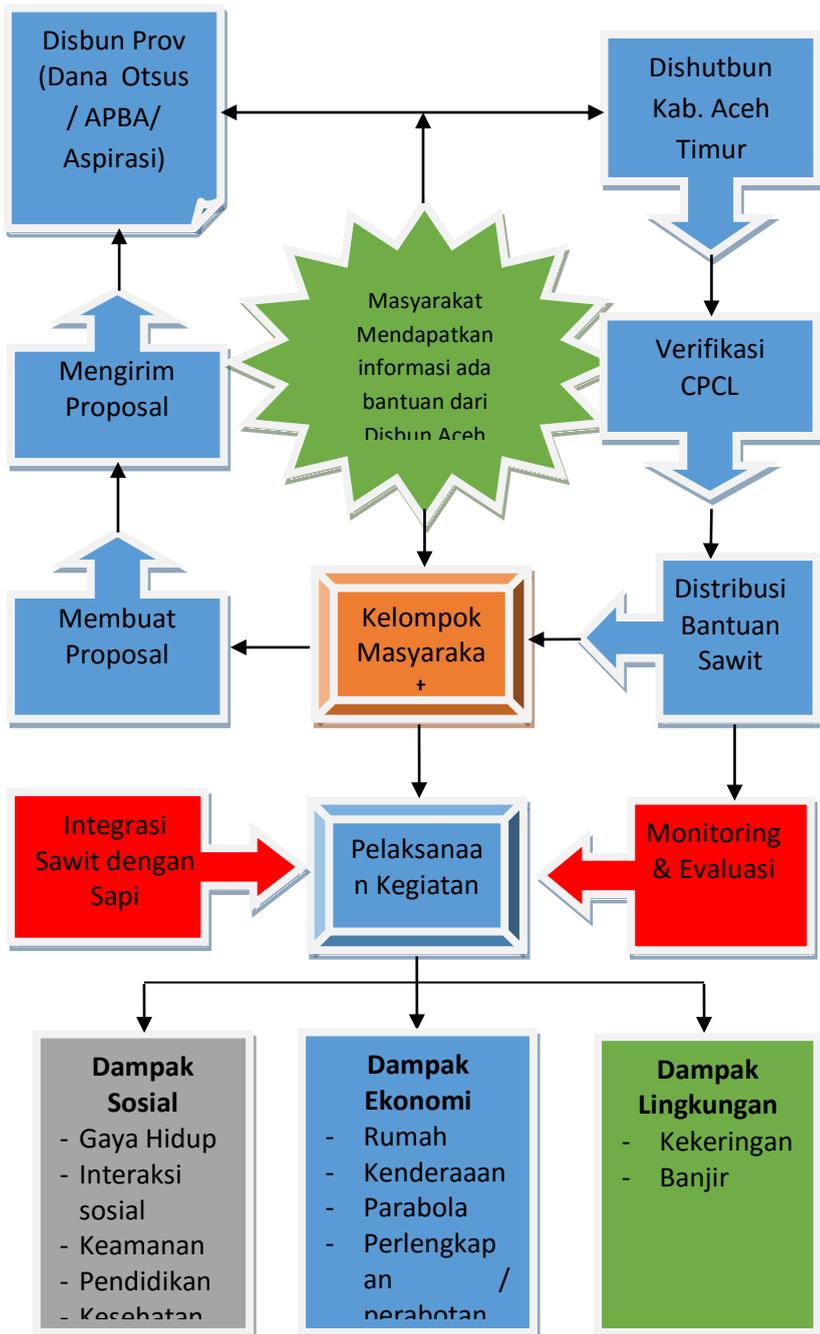


Model di atas dapat dijelaskan bahwa keempat unsur tersebut (petani, swasta, pemerintah dan akademisi) dapat berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Keempat unsur tersebut dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang baik. Petani sebagai sasaran pemberdayaan dari pemerintah akan berdaya jika pihak swasta melaksanakan bisnisnya dalam masyarakat sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut dapat bersinergi dengan akademisi dalam konsep dan gagasan. Pemerintah juga

dapat mengawal pihak swasta agar mereka mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika semua unsur ini berjalan dengan baik maka petani yang berdaya sebagaimana yang didambakan oleh pemerintah akan terwujud.

Model pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Timur adalah sebagai berikut:

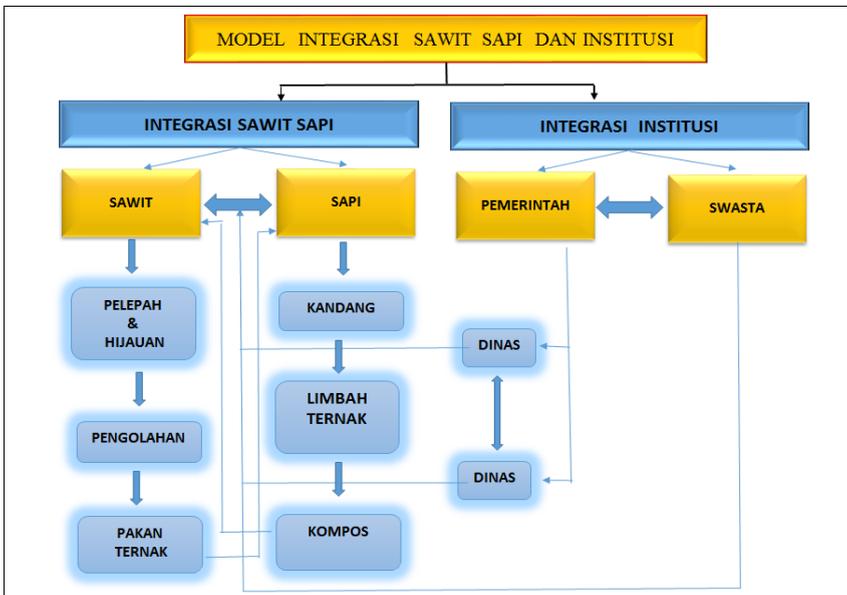
Gambar 6.2: Model Pemberdayaan di Aceh Timur



6.3 Analisis dan Pengembangan Model Integrasi

Melihat realita yang terjadi di masyarakat petani sawit sangat prospek untuk dikembangkan melalui model integrasi sawit dan sapi. Dengan model ini peningkatan ekonomi masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan model pemberdayaan tersebut maka kami menawarkan model integrasi sawit sapi yang melibatkan berbagai institusi terkait yaitu sebagai berikut:

Gambar 6.3 : Model Integrasi Sawit Sapi Institusi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.



Model ini tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap terhadap kehidupan

sosial keagamaan. Hal ini disebabkan integrasi sawit sapi bukan sebatas integrasi antar komoditas tetapi juga terjadi integrasi antar petani dan peternak sehingga solidaritas dan kerja sama masyarakat dapat terjalin yang mengakibatkan integrasi sosial menguat. Integrasi petani dan peternak juga telah memberi dampak positif dari segi efisiensi waktu kepada masyarakat sehingga dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan yang merupakan satu tradisi budaya dalam masyarakat tersebut. Pada akhirnya model integrasi ini tidak saja bagian dari pembangunan perdamaian pasca konflik tetapi juga dapat menumbuhkan nilai-nilai perdamaian pada masyarakat itu sendiri.

Jika model integrasi sawit dan sapi dapat berjalan secara baik, sesungguhnya terdapat delapan keuntungan bagi petani / peternak di perdesaan. Yaitu diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi, mengurangi resiko usaha karena faktor produksi, efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan input produksi atau mengurangi biaya produksi, mengurangi ketergantungan energi kimia dan biologi serta sumber masukaan lainnya.

Sistem ekologi lebih lestari serta tidak menimbulkan polusi sehingga ramah lingkungan, meningkatkan produksi atau pendapatan keluarga, mampu mengembangkan rumah tangga petani yang lebih mandiri dalam hal pangan, energi (biogas) dan

pendapatan secara berkelanjutan. Kedelapan keuntungan tersebut diperoleh karena adanya sinergi antar kegiatan, yang pada gilirannya tidak ada limbah yang terbuang (*zero waste*). Tidak ada limbah yang terbuang dengan sendirinya akan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

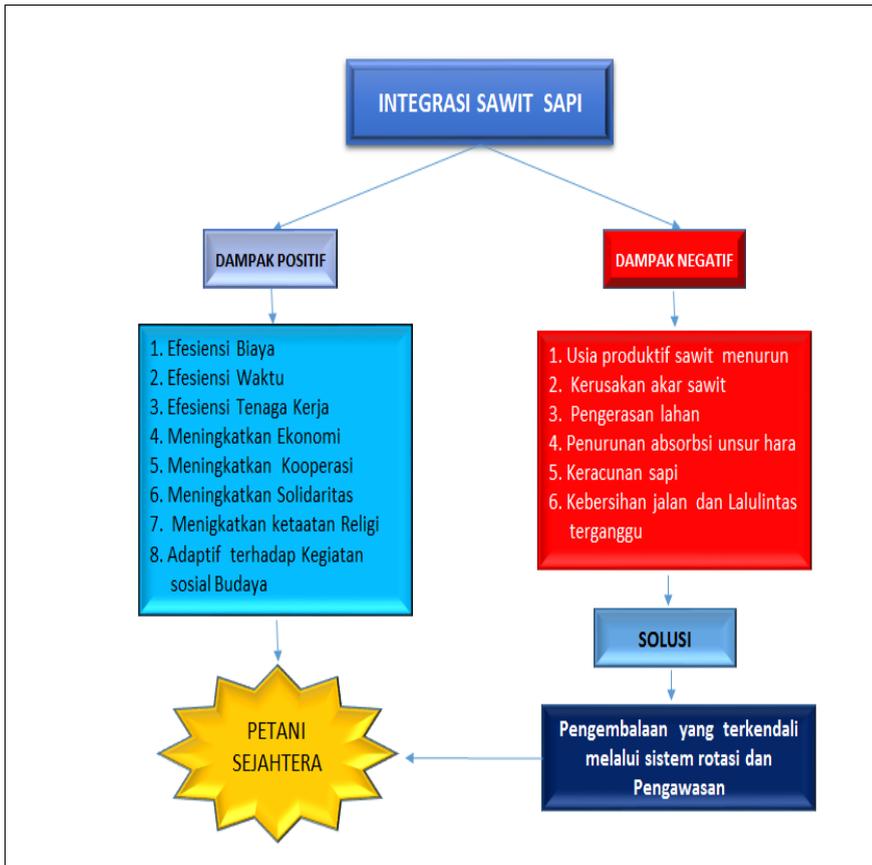
Menurut informan lain terkait dengan program integrasi sawit sapi sebenarnya PTPN sudah pernah melakukannya namun pelaksanaannya tidak berlanjut sampai saat ini. Alasannya dalam program integrasi sawit sapi terdapat dampak negatif yaitu jika sapi dibiarkan berkeliaran di dalam kebun maka kotoran sapi berceceran setiap tempat. Dalam korotan sapi tersebut banyak mengandung penyakit yang dalam jangka panjang bisa mengganggu pertumbuhan kelapa sawit akibat hama dari kotoran tersebut.

Umur sawit seharusnya bisa tahan sampai 25 tahun, kalau sudah terkena penyakit akibat hama tersebut umurnya tidak sampai 25 tahun. Oleh karena itu pihak PTPN memutuskan untuk tidak melanjutkan sistim integrasi saawit sapi dalam kebun mereka. Namun demikian pihak PTPN mengakui bahwa secara ekonomi integrasi sawit dan sapi memang menguntungkan. (Wawancara dengan Syamsuar, Kabag Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kantor Pusat PTP Langsa, 28 Juli 2017)

Selain dampak negatif di atas integrasi sawit sapi juga memiliki dampak negatif lainnya yaitu kerusakan akar permukaan sawit akibat dari perilaku sapi yang suka menggais sekitar pokok tanaman. Pengembalaan yang tidak terkendali dan berlebihan berdampak terhadap kelangkaan hijauan antara tanaman dan pengerasan lahan, sehingga terjadi penurunan absorpsi unsur hara.

Pada sisi lain juga punya dampak negatif terhadap sapi yaitu mengalami keracunan akibat dari aktifitas pemupukan dan penyomprotan atau sisa pestisida (Ardinovra, 2013). Untuk menghindari dampak negatif ini salah satu strateginya adalah dengan pengembalaan yang terkendali melalui sistem rotasi dan pengawasan. Secara skematik penjelasan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6. 4 : Dampak Integrasi Sawit Sapi



Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PTPN, ada dua bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu *Comunity Development* (CD) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan bantuan lepas untuk berbagai jenis kegiatan. Untuk bantuan *Comunity Development* pihak PTPN mengambil dana dari bagian

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan untuk bantuan lepas perusahaan menggunakan dana CSR nya.

Program CD yaitu program khusus yang diberikan untuk kegiatan usaha tani kelapa sawit, diberikan kepada lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi dan Pesantren) dan masyarakat yang tergabung dalam wadah koperasi. Supaya bantuan Cdnnya tepat sasaran pihak PTPN sebelum menyalurkan bantuan mereka mengecek keabsahan koperasi ke Dinas Koperasi Kabupaten setempat kemudian ke badan pertanahan untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah petani adalah sah. Kemudian pihak PTPN juga melakukan koordinasi dengan dinas perkebunan untuk melihat peta kesesuaian lahan. Jika semua tahapan tersebut telah selesai baru PTPN memberikan bantuan.

Program CD merupakan program dalam bentuk pemberian modal atau bantuan awal dalam kegiatan budidaya kelapa sawit yaitu mulai dari pembelian bibit. Pembersihan lahan dan kegiatan lain sampai tanaman menghasilkan atau 4-5 tahun. Bentuk bantuannya adalah berupa pinjaman yang harus dikembalikan oleh petani pada saat sawit sudah menghasilkan dengan cara dicicil. Ini dilakukan untuk tujuan supaya bantuan modal tersebut dapat digulirkan ke pihak lain yang belum mendapatkan. PTP telah membantu masyarakat melalui program Community Development (CD) sebesar 12.6 Milyar (Wawancara dengan

Syamsuar, Kabag Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kantor Pusat PTP Langsa, 28 Juli 2017).

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pihak PTPN tidak bersinergi secara langsung dengan pemerintah daerah terutama dalam bentuk dan jenis pemberdayaan yang akan dilaksanakan, pihak PTPN juga mengakui bahwa pemerintah juga dalam melakukan pemberdayaan terutama terkait dengan bantuan sawit kepada masyarakat tidak pernah meminta atau melibatkan pihak PTPN. Akan tetapi jika pihak pemerintah daerah meminta kepada PTPN mereka siap membantu.

Dalam hal ini berkaitan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah sudah terjadi dengan sendirinya melalui legalitas koperasi yang dibentuk masyarakat. Walaupun koordiansi secara formal dengan pemerintah tidak dilakukan.

Model pemberdayaan masyarakat melalui bantuan lunak ini pernah kita tawarkan kepada pemerintah namun pemerintah tidak menerapkannya. Pemerintah lebih suka memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tanpa ada satu kewajiban untuk mengaembalikan modal kepada pemerintah. Pada sisi lain bantuan pemerintah yang diberikan juga tidak sampai pada tahap berproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2015. *Praktek Mawah Melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>. Diakses 23 Juli 2016.
- Adams, Friedel Hutz. 2011. *Minyak Kelapa Sawit, Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak kelapa sawit*, <http://www.brot-fuer-die-welt.de/>. Diakses, 23 Oktober 2014.
- Almasdi Syahza. 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau, *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Ardinovra, 2013. *Strategi Pengembangan Usaha Integrasi Sawit Sapi Oleh BUMN Perkebunan*. <http://www.Slideshare.net/anovra/FDG-medan>
- Antjok, Jamaluddin. 1995. *Pemanfaatan organisasi lokal untuk mengentaskan kemiskinan – dalam kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Adytia Media, Yogyakarta.
- Bachrul Chairi. 2014. *Perkebunan Terintegrasi Solusi Swasembada Daging Sapi*, <http://www.nasionalisme.co/perkebunan-terintegrasi-solusi-swasembada-daging-sapi>
- Bangun, Rindukasih. 2010. *Analisis Sistem Integrasi Sapi – Kebun Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Pendapatan*

Petani di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Universitas Andalas, Padang.

- Choi, H. S., & Ahn, K. H. 2013. Assessing the Sustenance and Evolution of Social and Cultural Contexts Within Sustainable Urban Development, Using as A Case the MAC in South Korea. *Sustainable City & Society*, 6, 51–56.
- Dalle Daniel Sulekale. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, <http://www.ekonomirakyat.org>.
- Dillon, Hs. 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, Prisma No. 3-LP3ES Jakarta.
- Diwyanto, K., D. Sitompul, I. Manti. I.W. Mathius, dan Soentoro. 2004. Pengkajian pengembangan usaha sistem integrasi kelapa sawit-sapi. hlm. 11-22. *Prosiding Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi, Bengkulu 9-10 September 2003*. Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrical.
- Effendi, Machroes. 1996. *Dampak Sosial ekonomi dan Budaya Perkebunan Kelapa Sawit, Studi Kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara XIII di Kalimantan Barat*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Erwin, dkk. 2009. *Prospek dan tantangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber bahan bkar nabati dan mitigasi dampak perubahan iklim*. Semiloka.
- Green Peace. 2010. *Tertangkap Basah, Bagaimana Eksploitasi minyak Kelapa Sawit Oleh Nestle Memberi dampak Kerusakan Bagi Hutan Tropis Iklim dan Orang Hutan*. www.greenpeace.org
- Handaka, A. Hendriadi, dan T. Alamsyah. 2009. Perspektif Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam Sistem Integrasi Ternak – Tanaman Berbasis Sawit, Padi, dan

- Kakao. *Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi Ternak – Tanaman: Padi, Sawit, Kakao*. (In Press). Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Harris, Jonathan. 2003. *Sustainability and Sustainable Development*, <http://isecoeco.org/pdf/susdev.pdf>
- Manti, I., Azmi, E. Priyotomo, dan D. Sitompul. 2004. Kajian sosial ekonomi sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. hlm. 245-260. *Prosiding Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi*, Bengkulu 9-10 September 2003. Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrinical.
- Mawardati. 2010. *Penggunaan Faktor Produksi Dan Penerapan Teknologi Serta Kaitannya Dengan Pemilihan Saluran Pemasaran (Suatu Kasus Pada Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Nani Yunizar. 2014. *Aceh Timur Miliki Potensi Besar Pengembangan Sapi*, <http://www.kanalaceh.com/2016/01/01/>. Diakses 25 Juli 2016.
- Neuman, L.W. 1997. *Sosial Reseach Methodes: Qualitative & Quantitative Approach*. Boston: Allyn Bacon.
- Profil Kabupaten Aceh Timur. 2014. dalam <http://www.randalaceh.com>
- Saifuddin, dkk. 2014. *Kebijakan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui Komoditi Sawit di Kabupaten Aceh Timur*. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Saifuddin, dkk. 2015. The Local Economic Empowerment Ofthe Ex- Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) And Conflict Victims Through Palm

Oil Plantation Aid Program In East Aceh, *Internatonal Journal of Humanities and Soscial Science*, Vol. 5, No. 10. Hal. 119-124. USA.

Selo Sumarjan. 1977. Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologi, *Jurnal Sosiologi Indonesia* No. 2-1977, Ikatan Sosiologi Indonesia, Jakarta.

Starhm, Rudolf H. 1999. *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah kegagalan Pembangunan di Negara berkembang*, CIDES, Jakarta.

Syukur Iwantoro. 2014. *Potensi Jumlah Sapi di Kebun Sawit Capai 1,5 Juta Ekor*, <http://sawitindonesia.com/sajian-utama/>. Diakses 25 Juli 2016

UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*, Oxford University Press, New York.

UNEP. 2009. *From conflict to peacebuilding The role of natural resources and the environment*, KENYA, United Nations Environment Programme.

BIODATA PENULIS

Dr. Saifuddin Yunus, Lahir di Paya Laman, Aceh Timur, 20 Juli 1979. Gelar Sarjana (S1) diperoleh dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2002. Gelar Master diperoleh dari University Kebangsaan Malaysia Tahun 2005 dan Doktor diperoleh di Universiti yang sama Tahun 2013 dalam bidang Antropologi dan Sosiologi. Saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Dr. Suadi, Lahir di Meunasah Rumpuen-Meureudu, 16 Agustus 1976. Gelar Sarjana (S1) diperoleh dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Tahun 2000. Pendidikan Magister bidang Sosiologi ditamatkan di Universitas Padjadjaran, Bandung Tahun 2005 dan pendidikan Doktor bidang konflik dan perdamaian ditamatkan di University Sains Malaysia pada Tahun 2015. Saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Fadli, M. Si, Lahir di Idi Cut, 31 Desember 1973. Sarjana (S1) diselesaikan di Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2001 dan Program Magister (S2) diselesaikan pada Tahun 2007 di Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa (PWD). Saat ini dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya.

Selain itu pemerintah mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk memberikan layanan publik dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan jika berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Sawit mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat apalagi mendapat dukungan dari pemerintah. Dalam kasus Aceh misalnya setelah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah Aceh membuat salah satu program pemberdayaan masyarakat korban konflik dan mantan pejuang GAM dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Penerbit dan Percetakan
Bandar Publishing

Head Office.
Lamgugob, Syiah Kuala.
Banda Aceh. Provinsi Aceh.
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

ISBN 978-602-5440-02-1

